



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR:154/PI.04.03/02/2025

Yth. : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Dari : Inspektur Utama
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat Utama
Tanggal : 17 Februari 2025

Menindaklanjuti surat dari Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor B/850/PR.05.04/12/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Perubahan Jadwal Laporan Kinerja Tahun 2024, dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Inspektur Utama
Sekretariat Jenderal DPR RI,

Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si., CRGP., CGCAE





LAPORAN KINERJA 2024

Disusun oleh:
INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Utama untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Utama.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Jakarta, 7 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II

**Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H.,
M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, kita telah selesai melaksanakan seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 ini, yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan komitmen Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja selama tahun 2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi akuntabilitas kinerja dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Melalui Laporan Kinerja ini, diuraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi dan *achievement* Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI sepanjang tahun 2024.

Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja dengan optimal untuk tercapainya kinerja Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2024. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan juga sebagai media evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, Februari 2025

Inspektur Utama

Sekretariat Jenderal DPR RI,

Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si., CRGP., CGCAE

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si., CRGP

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., QGIA

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn, QGIA, GHIA, QIA

Ketua

Ade Efendi, S.Sos., M.M.

Wakil Ketua

Vita Fathiyah Yuniati, S.E., M.Ak

Sekretaris

Alisa Fatimah, S.E.

Anggota

Susriyanto, S.T., M.M

Zelka Sevrina, S.E.

Eri Riefika, S.E., M.Ak

Gilang Endah Permatasari, S.IP., M.A

Sri Nastiti Tri Nurasih S.E

Sri Hartati Agustin

Haryanti

Siti Atiah

Tim Layout

Liman Setiawan, S.AP

Oki Ganjar Ristawan, S.E.

Mochammad Ramadhan

DAFTAR ISI

ii

Kata Pengantar
Inspektur Utama

X

Ringkasan Eksekutif

16 - 61

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

1 - 8

Bab I
Pendahuluan

62

Bab IV
Penutup

9 - 15

Bab II
Perencanaan Kinerja

64

Lampiran

DAFTAR TABEL

- V** Tabel 1. Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2024
-
- 8** Tabel 2. Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Utama
-
- 13** Tabel 3. Target Kinerja Inspektorat Utama 2020-2024 (Renstra Ittama)
-
- 15** Tabel 4. Perjanjian Kinerja ITTAMA Tahun 2024
-
- 16** Tabel 5. Indikator Kinerja Pada Renstra Yang Tidak Tercantum Pada Perjanjian Kinerja Ittama 2024
-
- 17** Tabel 6. Capaian Kinerja ITTAMA Tahun 2024
-
- 19** Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan 2024
-
- 21** Tabel 8. Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra Ittama
-
- 25** Tabel 9. Hasil Capaian Kinerja Setjen DPR RI
-
- 25** Tabel 10. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI
-
- 27** Tabel 11. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Indeks RB
-
- 28** Tabel 12. Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI
-
- 29** Tabel 13. Capaian Komponen Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI
-

DAFTAR TABEL

- 14** Tabel 14. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

- 31** Tabel 15. Realisasi Jumlah Unit Kerja yang Memenuhi Persyaratan Predikat WBK

- 32** Tabel 16. Rekapitulasi Penilaian TPI Setjen DPR RI

- 33** Tabel 17. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Unit Kerja Yang Memenuhi Persyaratan Predikat WBK

- 34** Tabel 18. Realisasi Capaian Tingkat Kepatuhan LHKPN

- 36** Tabel 19. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Tingkat Kepatuhan LHKPN

- 37** Tabel 20. Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKAN

- 38** Tabel 21. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Tingkat Kepatuhan LHKAN

- 38** Tabel 22. Realisasi Nilai IKPA Inspektur Utama

- 40** Tabel 23. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Nilai IKPA

- 41** Tabel 24. Realisasi Capaian Skor Maturitas SPIP Setjen DPR RI

- 41** Tabel 25. Realisasi Skor Maturitas SPIP Setjen DPR RI Tahun 2022-2024

- 43** Tabel 26. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Skor Maturitas SPIP

- 44** Tabel 27. Hasil Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK dan APIP Setjen DPR RI

DAFTAR TABEL

- 45 Tabel 28. Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di Setjen DPR RI
-
- 46 Tabel 29. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI
-
- 48 Tabel 30. Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP di Setjen DPR RI
-
- 49 Tabel 31. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP
-
- 50 Tabel 32. Hasil Capaian Nilai Evaluasi AKIP dan Kapabilitas APIP Inspektorat Utama
-
- 50 Tabel 33. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Utama
-
- 51 Tabel 34. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2024
-
- 52 Tabel 35. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama
-
- 53 Tabel 36. Realisasi Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP
-
- 54 Tabel 37. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP
-
- 56 Tabel 38. Realisasi Pagu Anggaran Inspektorat Utama pada Tahun 2024
-
- 57 Tabel 39. Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektorat I
-
- 57 Tabel 40. Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektorat II
-
- 58 Tabel 41. Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektur Utama

DAFTAR GAMBAR

- 4** Gambar 1. Fungsi Inspektorat Utama Setjen DPR RI

- 5** Gambar 2. Struktur organisasi Inspektorat Utama

- 7** Gambar 3. Grafik Tingkat Pendidikan dan Gelar Sertifikasi SDM Utama

- 8** Gambar 4. Visi dan Misi Inspektorat Utama

- 12** Gambar 5. Budaya Kerja “BERSIH” serta Tujuan dan Sasaran Inspektorat Utama

- 23** Gambar 6. Dokumentasi Pelaksanaan Telaah Sejawat Eksternal Tahun 2023 Utama Sekretariat Jenderal DPR RI ditelaah oleh Inspektorat Jenderal BPS RI

- 23** Gambar 7. Dokumentasi Penganugerahan Silver Winner PPIA Award 2024 Tata Usaha Inspektorat II, Agustus 2024

- 24** Gambar 8. Dokumentasi Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 kepada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI di Jakarta, 20–21 November 2024

- 26** Gambar 9. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2022–2024

- 29** Gambar 10. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022–2024

- 31** Gambar 11. Dokumentasi Penghargaan Atas Implementasi SAKIP Terbaik Tahun 2024

- 32** Gambar 12. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK tahun 2024

- 34** Gambar 13. Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim TPI Pembangunan ZI dan Submit Evaluasi Penilaian ZI ke TPN

DAFTAR GAMBAR

- 35 Gambar 14. Grafik Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKPN Setjen DPR RI
-
- 35 Gambar 15. Monitoring Pelaporan LHKPN di aplikasi E-LHKPN
-
- 36 Gambar 16. Jumlah Wajib Laport LHKPN Setjen DPR RI Tahun 2024
-
- 38 Gambar 18. Grafik Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKAN Setjen DPR RI
-
- 42 Gambar 19. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Skor Maturitas SPIP Tahun 2022-2024
-
- 44 Gambar 20. Dokumentasi *Benchmarking* Maturitas SPIP dan SPI KPK ke Inspektorat Prov Kalimantan Timur
-
- 45 Gambar 21. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK Tahun 2022-2024
-
- 47 Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan penyelesaian TLHP BPK RI
-
- 48 Gambar 23. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP Tahun 2022-2024
-
- 51 Gambar 24. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama
-
- 53 Gambar 25. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP
-
- 56 Gambar 26. Kegiatan upaya pencapaian kapabilitas APIP/IACM
-

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Inspektorat Utama menetapkan 4 (empat) Sasaran Program dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja (IK). Gambaran capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A 88,00	BB 78,80*	89,55%
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80,00)	B 68,92	86,15%
		3.	Jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK	6	6	100%
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
		5.	Tingkat kepatuhan LHKAN	100%	100%	100%
		6.	Nilai IKPA Inspektur Utama - Revisi DIPA - Revisi hal 2 DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	96 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80	83,61 10,00 8,29 18,32 10,00 18,65	87,09% 104,17% 43,17% 76,33% 69,44% 64,75%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Skor maturitas SPIP	Level 3 (3,28)	Level 3 (3,60)	109,76%
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	90%	95,12%**	105,69%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	68%	88,1%	129,56%

INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama	BB (80,00)	BB (76,20)	95,25%
		2.	Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,38)	112,67%

*realisasi 2023 **realisasi smt I 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja, sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan WBK, tingkat kepatuhan LHKPN dan LHKAN, skor maturitas SPIP, serta persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP, tingkat penilaian kapabilitas APIP. Namun terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang belum memenuhi target kinerja 2024 yaitu indeks reformasi birokrasi, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, Nilai IKPA Inspektur Utama dan nilai evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama.

Capaian kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2024 didukung oleh anggaran sebesar Rp10.081.694.000,00 sesuai yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2024. Namun, berdasarkan surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor B/59/PR.07/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal penyampaian Kebijakan Optimalisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2024, terdapat optimalisasi anggaran Inspektorat Utama sebesar Rp2.231.304.000,00 sehingga anggaran yang dapat direalisasikan menjadi sebesar Rp7.850.390.000,00. Pada akhir triwulan IV 2024 realisasi anggaran Inspektorat Utama sebesar Rp7.848.378.182,00 atau telah mencapai 99,97%.

Keberhasilan ini, merupakan hasil dari komitmen dan kolaborasi kerja cerdas para pegawai di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kinerjanya, antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi.
2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang disesuaikan dengan struktur penganggaran.
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama yang berkualitas.
4. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pengawasan Internal yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Tujuan utama dari pengawasan internal adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan organisasi. Selain itu, pengawasan internal juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja dalam organisasi.

Dalam prakteknya, pengawasan internal melibatkan berbagai pihak, baik itu manajemen puncak, auditor internal, maupun unit-unit lainnya di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan internal juga harus didukung oleh sistem dan prosedur yang jelas, serta budaya organisasi yang mendukung pengawasan yang efektif.

Sebagai unsur yang bertugas untuk melakukan pengawasan internal, Inspektorat Utama hadir untuk memperkuat Setjen DPR RI menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Inspektorat Utama bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Setjen DPR RI, yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional, keuangan, dan administrasi untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2024, Inspektorat Utama telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan yang sudah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko. PKPT Berbasis Risiko merupakan gambaran rencana kerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun 2024 dengan menggunakan metode pendekatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko-risiko yang berpotensi merugikan organisasi, baik dari segi keuangan, operasional, maupun kepatuhan terhadap peraturan.

Kegiatan pengawasan yang terangkum dalam PKPT Inspektorat Utama Tahun 2024, meliputi kegiatan audit, revidu, evaluasi, pendampingan dan pengawas lainnya. Adapun sejumlah rencana kegiatan tersebut, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya dipengaruhi berbagai faktor, seperti banyaknya permintaan kegiatan pendampingan/*mandatory* dari Pimpinan DPR RI/Pimpinan Setjen DPR RI dan unit kerja, sehingga berdampak pada *timeline* pelaksanaan kegiatan yang sudah terencana. Banyaknya permintaan pendampingan/konsultasi maupun penugasan *mandatory* dari Pimpinan instansi maupun unit kerja menunjukkan pentingnya peran Inspektorat Utama sebagai aparat pengawasan intern di Setjen DPR RI. Selain faktor tersebut, perubahan dalam realisasi kegiatan bisa terjadi dalam situasi dan kondisi tertentu seiring dengan dinamika organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Utama Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama sepanjang tahun 2024. Dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, laporan ini dipublikasikan untuk stakeholder dan masyarakat luas melalui *website* ittama.dpr.go.id dan rb.menpan.go.id.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/3 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidu Atas Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Gambar 1. Fungsi Inspektorat Utama Setjen DPR RI

Inspektorat Utama, terdiri atas:

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II,
- c. Bagian Administrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Inspektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif, serta Pusat Teknologi Informasi.

Inspektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian.

Bagian Administrasi Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Utama, serta tindak lanjut dan pelaporan Inspektorat Utama. Berikut adalah struktur organisasi Inspektorat Utama:



Gambar 2. Struktur organisasi Inspektorat Utama
(Sumber: Data yang diolah oleh Ittama)

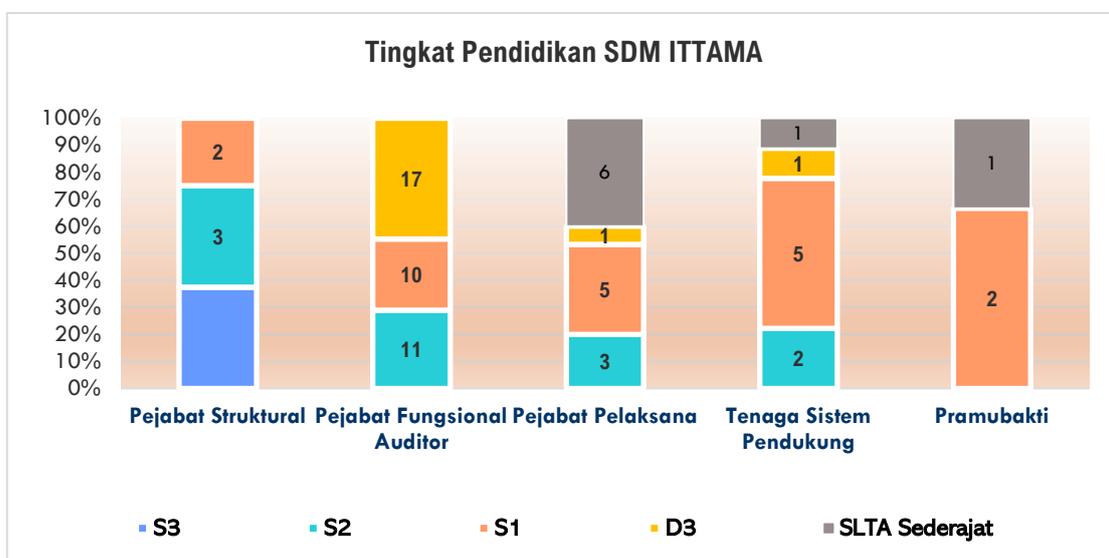
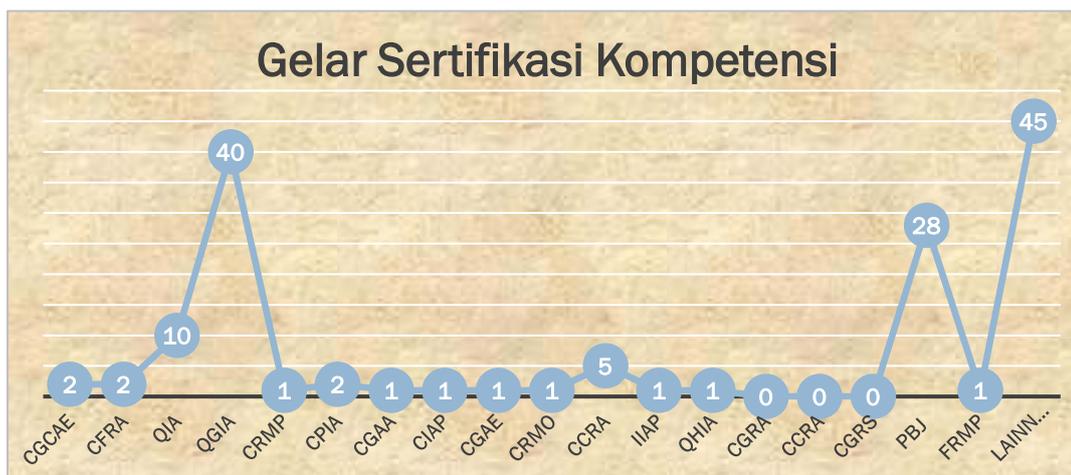
Berdasarkan struktur organisasi di atas, Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, terdapat 73 (tujuh puluh tiga) personel dan sebagian besar SDMnya memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan telah dibekali dengan pelatihan-pelatihan untuk menunjang pelaksanaan tugas khususnya di bidang pengawasan internal.

1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Dalam mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, Inspektorat Utama menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang menjadi aspek strategis dalam mencapai target kinerja. Aspek strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Utama dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia di Inspektorat Utama, baik secara kuantitas maupun kualitas sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama. Secara keseluruhan, komposisi SDM yang ada di lingkup Inspektorat Utama saat ini terdiri dari Inspektur Utama, Inspektur I, Inspektur II, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pelaksana, serta didukung oleh Tenaga Sistem Pendukung. Total SDM Inspektorat Utama berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang terdiri dari 8 (delapan) pejabat struktural, 2 (dua) auditor ahli utama, 4 (empat) auditor ahli madya, 10 (sepuluh) auditor ahli muda, 4 (empat) auditor ahli pertama, 18 (delapan belas) auditor terampil, 6 (enam) penelaah teknis kebijakan, 9 (sembilan) pengelola data informasi, 9 (sembilan) tenaga sistem pendukung dan 3 (tiga) pramubakti. Berikut adalah komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan dan gelar sertifikasi kompetensi:



Gambar 3. Grafik Tingkat Pendidikan dan Gelar Sertifikasi SDM Ittama
(sumber : Data yang diolah oleh Ittama)

Kualitas SDM Inspektorat Utama perlu ditingkatkan baik melalui peningkatan jenjang pendidikan, program pelatihan dan pengembangan SDM, sertifikasi kompetensi dan lain-lain. Secara kuantitas, SDM Ittama dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan analisa dan beban kerja:

**Tabel 2. Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Utama
(sumber: Renstra Ittama 2020 – 2024 & SK Analisis Jabatan dan Beban Kerja)**

NO	JABATAN	JUMLAH		SELISIH
		IDEAL	TERSEDIA	
1	Auditor Ahli Utama	2	2	0
2	Auditor Madya (4 GT x 1 Auditor)	4	4	0
3	Auditor Muda (4 GT x 3 Auditor)	12	10	2
4	Auditor Pertama/Auditor Terampil	36	22	14
5	Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat I	2	1	1
6	Pengelola Data dan Informasi Inspektorat I	2	2	0
7	Pengadministrasi Perkantoran Inspektorat I	2	0	2
8	Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat II	2	1	1
9	Pengelola Data dan Informasi Inspektorat II	2	1	1
10	Pengadministrasi Perkantoran Inspektorat II	2	0	2
11	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Tata Usaha Bagian Adm. Ittama	4	2	2
12	Pengelola Data dan Informasi Sub Tata Usaha Bagian Adm. Ittama	4	2	2
13	Pengadministrasi Perkantoran Sub Tata Usaha Bagian Adm. Ittama	4	0	4
14	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Tindak Lanjut dan Pelaporan Bagian Adm. Ittama	4	3	1
15	Pengelola Data dan Informasi Sub Tindak Lanjut dan Pelaporan Bagian Adm. Ittama	2	3	+1
16	Pengadministrasi Perkantoran Sub Tindak Lanjut dan Pelaporan Bagian Adm. Ittama	2	0	2

Berdasarkan komposisi SDM di Inspektorat Utama Setjen DPR RI, jika dibandingkan dengan jumlah ideal yang dibutuhkan, maka masih dibutuhkan penambahan baik pada jabatan fungsional maupun jabatan struktural. Untuk kekurangan pada jabatan struktural, beberapa dipenuhi oleh tenaga sistem pendukung, namun secara kualitas belum sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Sedangkan dalam pemenuhan jabatan fungsional auditor, dilakukan *assessment* oleh BPKP sesuai pengajuan dan rekomendasi.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Utama, diperlukan strategi pengelolaan SDM secara menyeluruh, seperti analisis kebutuhan SDM, pengembangan kapasitas dan kompetensi, penilaian kinerja yang obyektif, peningkatan motivasi dan kesejahteraan, serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala.

2. Sarana dan Prasarana Penunjang Belum Memadai

Inspektorat I terdiri dari 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 1 (satu) Pejabat Pengawas, memiliki 20 (dua puluh) pejabat fungsional auditor di seluruh jenjang, 3 pejabat pelaksana dan 4 tenaga sistem pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat I telah didukung dengan prasarana yang memadai, seperti telah memiliki ruang kerja, ruang rapat, dan ruang konsultasi yang telah memadai. Untuk prasarana telah didukung alat-alat kerja yang dibutuhkan, namun masih memerlukan beberapa alat kerja tambahan yang dibutuhkan saat ini yaitu perangkat laptop untuk masing-masing auditor dalam menunjang tugas pengawasan.

Inspektorat II terdiri dari 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 1 (satu) Pejabat Pengawas, memiliki 16 (enam belas) pejabat fungsional auditor di seluruh jenjang, 2 (dua) pejabat pelaksana, dan 2 (dua) tenaga sistem pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat II telah memiliki ruang kerja namun belum memadai, karena belum memiliki ruang rapat maupun ruang konsultasi. Untuk prasarana, masih memerlukan beberapa alat kerja yaitu perangkat laptop untuk masing-masing auditor agar dapat lebih *agile* dan fleksibel dalam menunjang tugas pengawasan.

Bagian Administrasi Inspektorat Utama juga memiliki peran yang cukup penting dalam menunjang kegiatan Inspektur Utama. Bagian Administrasi Inspektorat Utama terdiri dari Kepala Bagian Administrasi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan, 10 pejabat pelaksana, dan 5 tenaga sistem pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Administrasi Inspektorat Utama memiliki prasarana berupa ruang kerja yang masih belum memadai, ruang rapat utama untuk penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi namun masih belum cukup untuk menampung seluruh pegawai Inspektorat Utama sehingga perlu *redesign* ulang.

Untuk prasarana, masih memerlukan beberapa alat kerja seperti perangkat *personal computer* (pc), laptop, alat perekam, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3. Perubahan Regulasi/Kebijakan

Tahun 2024, bertepatan dengan tahun politik di Indonesia, banyak perubahan regulasi/kebijakan yang salah satunya adanya optimalisasi kegiatan dan anggaran, sehingga beberapa kegiatan yang telah direncanakan dalam PKPT harus disesuaikan, dengan meminimalisir dampaknya terhadap capaian target kinerja Instansi. Karena pencapaian target kinerja instansi memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai elemen dalam organisasi, komitmen dari seluruh pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi serta kesadaran akan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang baik, serta evaluasi yang teratur yang semuanya itu membutuhkan anggaran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Renstra disusun sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 serta mengacu pada Renstra Setjen DPR RI tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024.

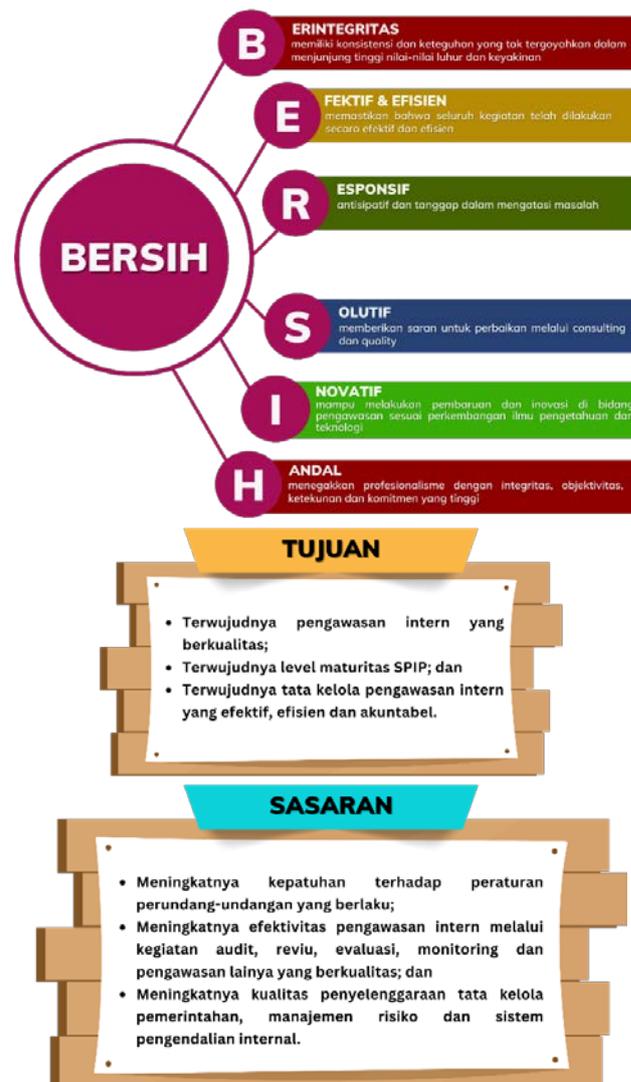
Visi Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan strategis. Visi merupakan gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Inspektorat Utama dalam menunjang kinerja Setjen DPR RI, sedangkan Misi Inspektorat Utama merupakan langkah-langkah konkret dan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi Inspektorat Utama yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun Visi dan Misi Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 4. Visi dan Misi Inspektorat Utama

Inspektorat Utama sebagai unit yang melaksanakan fungsi pengawasan internal di Setjen DPR RI telah menerapkan *core values* (nilai-nilai dasar) Budaya BerAKHLAK yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2021, hal ini tercermin dalam aspek akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta peningkatan kualitas dan kinerja Inspektorat Utama. Inspektorat Utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya berorientasi pada pelayanan dan tidak menerima gratifikasi sebagaimana tercantum pada setiap surat penugasan dan dikuatkan oleh Sertifikat SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang dimiliki Inspektorat Utama.

Selain itu, Inspektorat memiliki slogan tersendiri yang diharapkan dapat diinternalisasikan dalam mengemban pelaksanaan tugas dan fungsinya. Budaya Kerja Inspektorat Utama adalah “BERSIH”.



Gambar 5. Budaya Kerja “BERSIH” serta Tujuan dan Sasaran Inspektorat Utama

Rencana Strategis Inspektorat Utama telah dilakukan revisi pada triwulan 3 2024 untuk menyesuaikan target indikator kinerja agar selaras dengan Rencana Strategis Setjen DPR dan Perjanjian Kerja Inspektorat Utama Tahun 2024. Pada Renstra Utama revisi, sasaran program strategis Utama terdiri dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan, dimana masing-masing sasaran kegiatan memiliki target indikator kinerja (IKK) sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Target Kinerja Inspektorat Utama 2020-2024 (Renstra Utama)
(Sumber : Renstra Inspektorat Utama Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 Revisi)

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN					TARGET AKHIR
			2020	2021	2022	2023	2024	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A (88,00)	A (88,00)
		Unit Kerja Eselon II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2 unit kerja	4 unit kerja	6 unit kerja	5 unit kerja	6 unit kerja	6 unit kerja
		Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Kepatuhan LHKAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB (75,00)	BB (80,00)	BB (80,00)
		Nilai IKPA Inspektur Utama:					96	96
		- Revisi DIPA					9,60	9,60
	- Revisi Hal II DIPA					19,20	19,20	
	- Penyerapan Anggaran					24,00	24,00	
	- Penyelesaian Tagihan					14,40	14,40	
- Capaian Output					28,80	28,80		
	Terwujudnya tata kelola keuangan yang baik	Jumlah Unit Kerja Eselon II yang mengimplementasikan Manajemen Risiko	6 unit kerja	12 unit kerja	18 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja

INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN					TARGET AKHIR
			2020	2021	2022	2023	2024	2024
Meningkatnya kualitas dan kapabilitas Organisasi Inspektorat Utama	Terwujudnya pengawasan Inspektorat Utama yang berintegritas dan akuntabel	Level Kapabilitas APIP (Maturitas IACM)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,2)
		Telaah Sejawat (Skor <i>Peer Review</i>)	-	-	-	Baik	-	Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Evaluasi AKIP	B	B	B	BB (75,00)	BB (80,00)	BB (80,00)
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset/Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi APIP	75%	80%	50%	67%	68%	68%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	100%	100%	70%	89%	90%	90%
	Sarana dan Prasarana Inspektorat Utama memadai	Persentase sarana dan prasarana ltama	75%	80%	85%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Anggaran ltama yang optimal	Kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Utama	96%	96%	96%	98%	98%	98%
Meningkatnya kualitas pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Mewujudkan kualitas pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Skor Maturitas SPIP	-	Level 3	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,28)	Level 3 (3,28)

Pada Renstra Ittama 2020-2024 revisi terdapat sejumlah perubahan dalam indikator kinerja kegiatan (IKK) maupun target indikator kinerja kegiatan. Beberapa indikator yang sudah tidak lagi dicantumkan dalam Renstra Ittama revisi, yaitu: persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit oleh auditi, persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti auditi, persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dalam 60 (enam puluh) hari. Adapun indikator baru yang dimasukkan dalam Renstra Ittama Revisi diantaranya: tingkat kepatuhan LHKPN, tingkat kepatuhan LHKAN, nilai IKPA Inspektur Utama, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK, serta skor maturitas SPIP.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 sudah memuat sebagian besar indikator kinerja sesuai dengan Renstra Ittama (revisi) dan juga telah dilakukan penyesuaian target kinerja berdasarkan capaian kinerja tahun 2023. Berikut adalah Perjanjian Kinerja ITTAMA Tahun 2024:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja ITTAMA Tahun 2024
(Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Satker Setjen)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A (88,00)
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80,00)
		3.	Jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK	6
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%
		5.	Tingkat kepatuhan LHKAN	100%
		6.	Nilai IKPA Inspektur Utama	96
		– Revisi DIPA	9,60	
		– Deviasi Halaman III DIPA	19,20	
		– Penyerapan Anggaran	24,00	
		– Penyelesaian Tagihan	14,40	
		– Capaian Output	28,80	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Skor maturitas SPIP	Level 3 (3,28)
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	90%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	68%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama	BB (80,00)
		2.	Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3 (3,00)

Berdasarkan 2 (dua) tabel di atas, masih dapat terlihat beberapa indikator kinerja kegiatan pada Renstra Ittama revisi yang belum dicantumkan di Perjanjian Kinerja Tahun Ittama Tahun 2024, yaitu:

Tabel 5. Indikator Kinerja Pada Renstra Yang Tidak Tercantum Pada Perjanjian Kinerja Ittama 2024 (Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Satker Setjen dan Renstra Ittama Revisi)

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Telaah Sejawat	Baik
2.	Sertifikasi Auditor	100%
3.	Tingkat kepuasan auditi terhadap layanan Inspektorat Utama	Sangat Baik
4.	Persentase sarana dan prasarana Inspektorat Utama	100%
5.	Kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Utama	98%

Untuk 5 (lima) indikator kinerja tersebut tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja Ittama tahun 2024 dikarenakan ketidakselarasan Renstra Ittama dengan Renstra Sekjen, dimana perjanjian kinerja Ittama merupakan turunan dari Renstra Sekjen. Namun antara Perjanjian Kinerja Sekjen DPR RI dan Perjanjian Kinerja Ittama telah dilakukan *cascading*, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

ESELON I		
SEKRETARIS JENDERAL		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	
Indikator	Target	
1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3.74
SASARAN PROGRAM		
S.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	
Indikator	Target	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	A (88,00)
2	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80,00)
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
4	Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3 (3,28)
5	Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3 (3,2)
6	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6
7	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (88)
SASARAN PROGRAM		
S.3	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	
Indikator	Target	
1	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,15)
2	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,6)

INSPEKTOR UTAMA		
SASARAN PROGRAM		
S.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	
Indikator	Target	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	A (88)
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (80,00)
3	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6
4	Tingkat kepatuhan LHKPN	100%
5	Tingkat kepatuhan LHKAN	100%
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektur Utama	96
SASARAN PROGRAM		
S.2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	
Indikator	Target	
1	Skor maturitas SPIP	Level 3 (3,28)
SASARAN PROGRAM		
S.3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	
Indikator	Target	
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	90%
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	68%
SASARAN PROGRAM		
S.4	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektur Utama	
Indikator	Target	
1	Nilai Evaluasi AKIP di lingkup Inspektur Utama	B (80,00)
2	Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3 (3,28)

Pada Tahun 2024, terdapat 1 (satu) indikator yang berbeda redaksionalnya antara perjanjian kinerja Sekjen DPR RI dengan perjanjian kinerja Ittama yaitu jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK menjadi jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK pada Perjanjian Kinerja Ittama. Perubahan ini dilakukan karena pertimbangan dari pimpinan Inspektorat Utama bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja dan nilainya tidak dapat diprediksi/terkontrol dikarenakan penilaian dilakukan oleh KemenPAN RB.

Kedepannya, untuk Renstra Ittama tahun 2025 - 2029 akan diselaraskan antara indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam Renstra Ittama dan Renstra Sekjen sehingga Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama akan selaras dengan Renstra Ittama.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama merujuk pada kewajiban Inspektorat Utama untuk memastikan bahwa setiap program, aktivitas, dan kebijakan yang dijalankan memenuhi tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, akuntabilitas kinerja berfokus pada hasil yang dicapai dan sejauh mana tujuan strategis organisasi tercapai melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama.

Adapun tingkat ketercapaian (keberhasilan dan kegagalan) dari setiap target indikator kinerja yang ditetapkan, yang selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi Ittama secara berkelanjutan, secara singkat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja ITTAMA Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A (88,00)	BB 78,80*	89,55%
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80,00)	B 68,92	86,15%
		3.	Jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK	6	6	100%
		4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
		5.	Tingkat kepatuhan LHKAN	100%	100%	100%
		6.	Nilai IKPA Inspektur Utama	96	83,61	87,09%
			Revisi DIPA	9,6	10	104,16%
			Deviasi Halaman III DIPA	19,2	8,29	43,18%
			Penyerapan Anggaran	24	18,32	76,33%
			Penyelesaian Tagihan	14,4	10	69,44%
			Capaian Output	28,8	18,65	64,76%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Skor maturitas SPIP	Level 3 (3,28)	Level 3 (3,60)	109,76%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	90%	95,12%**	105,69%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	68%	88,1%	129,56%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama	BB (80,00)	BB (76,20)	95,25%
		2.	Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,38)	112,67%

*Realisasi 2023 **Realisasi Smt I 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu persentase skor maturitas SPIP, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK dan APIP, serta tingkat penilaian kapabilitas APIP, 2 (dua) indikator yang memenuhi/sesuai target yaitu tingkat kepatuhan LHKPN dan LHKAN. Namun, masih terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang belum memenuhi target, yaitu indeks reformasi birokrasi, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, nilai IKPA Inspektur Utama dan nilai evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama.

Selanjutnya, apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2022, 2023 dan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 sampai dengan 2024

Sasaran	Indikator kinerja		Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,01)	A (87,20)	A (88,00)	BB (78,05)	BB* (78,05)	BB (78,80)*	97,55%	89,50%	89,55%
	2.	Unit kerja Eselon II yang memenuhi persyaratan predikat WBK	6	5	6	4	5	6	67%	100%	100%
	3.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.	Tingkat kepatuhan LHKAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (60,01)	BB (75,00)	BB (80,00)	B (67,28)	B (67,46)	B (68,92)	112,11%	89,95%	86,15%
	6.	Nilai IKPA Inspektur Utama	-	-	96	-	-	83,61	-	-	87,09%
Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Indeks RB di lingkup lttama	A	-	-	AA	-	-	121%	-	-
	2.	Tingkat penilaian kapabilitas APIP (Maturitas IACM)	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,2)	Level 2	Level 3 (3,045)	Level 3 (3,38)	67%	98,22%	105,63%
	3.	Hasil Evaluasi AKIP	B (60,01)	BB (75,00)	BB (80,00)	B	BB (70,90)	BB (76,20)	118,14%	96,20%	95,25%
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	50%	67%	68%	73,13%	82,5%	88,1%	146%	123,13%	129,56%
	2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	70%	89%	90%	86,75%	90,61%	95,12%**	124%	101,81%	105,69%

Sasaran	Indikator kinerja		Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1.	Skor maturitas SPIP	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,28)	Level 3	Level 3 (3,27)	Level 3 (3,60)	100%	101,55%	109,76%
	2.	Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	2	-	-	4	-	-	200%	-	-

*Realisasi 2023 **Realisasi Smt I 2024

Berdasarkan data di atas, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ittama dari tahun ke tahun selalu meningkat, dengan tujuan untuk memotivasi pegawai Ittama untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Mulai tahun 2023 dan 2024, terdapat terdapat 2 (dua) indikator yang tidak lagi dimasukkan pada Renstra Ittama dan Perjanjian Kinerja 2024 yaitu unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3 dan Indeks RB di lingkup Ittama, hal ini dikarenakan penilaian hanya dilakukan secara menyeluruh per instansi (Setjen DPR) bukan per unit eselon I.

Selain itu, terdapat 1 (satu) indikator yang baru dimasukkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, yaitu nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Inspektur Utama.

Capaian target kinerja dari tahun 2022 s.d tahun 2024 secara umum meningkat, meskipun masih ada 4 (empat) indikator yang tidak dapat tercapai sesuai target pada tahun 2024, yaitu indeks RB, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, nilai IKPA Inspektur Utama dan nilai evaluasi AKIP Ittama. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja Ittama terhadap Indikator kinerja pada Renstra Ittama:

Tabel 8. Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra Ittama

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Akhir Renstra
Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (78,80)*	A (88)	89,55%
	Jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK	6 unit kerja	6 unit kerja	100%
	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
	Tingkat Kepatuhan LHKAN	100%	100%	100%
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (68,92)	BB (80)	100%
	Nilai IKPA Inspektur Utama:	83,61	96	87,09%
	- Revisi DIPA	10	9,6	104,16%
- Revisi Hal III DIPA	8,29	19,2	43,18%	
- Penyerapan Anggaran	18,32	24	76,33%	
- Penyelesaian Tagihan	10	14,4	69,44%	
- Capaian Output	18,65	28,8	64,76%	
Terwujudnya tata kelola keuangan yang baik	Jumlah Unit Kerja Eselon II yang mengimplementasikan Manajemen Risiko	20 unit kerja	20 unit kerja	100%
Terwujudnya pengawasan Inspektorat Utama yang berintegritas dan akuntabel	Level Kapabilitas APIP (Maturitas IACM)	Level 3 (3,38)	Level 3 (3,2)	105,63%
	Telaah Sejawat (Skor Peer Review)	-	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Hasil Evaluasi AKIP	BB (76,2)	BB (80)	95,25%
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset/Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi APIP	88,1%	68%	129,56%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	95,12%**	90%	105,69%**
Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Inspektorat Utama	Sertifikasi Auditor	-	100%	-
	Tingkat kepuasan auditi terhadap layanan Ittama	-	Sangat Baik	-
Sarana dan Prasarana Inspektorat Utama memadai	Persentase sarana dan prasarana Ittama	-	100%	-
Pengelolaan Anggaran Ittama yang optimal	Kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Utama	-	98%	-
Mewujudkan kualitas pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,60)	Level 3 (3,28)	109,76%

*Realisasi 2023 **Realisasi Smt I 2024

Berdasarkan data di atas, bahwa capaian pada tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir renstra dan perjanjian kerja lttama rata-rata telah tercapai. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang belum capai target yaitu indeks reformasi birokrasi, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, Nilai IKPA Inspektur Utama dan nilai evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama. Untuk indeks reformasi birokrasi dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI Tahun 2024, sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, belum ada rilis resmi dari KemenPANRB. Namun, berdasarkan realisasi tahun 2023, Setjen DPR RI belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi dari KemenPAN RB.

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah menerima telaah sejawat eksternal yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai Surat AAIPI Nomor 78/AAIPI/KTS/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 perihal Penetapan APIP Penelaah dan Ditelaah Telaah Sejawat Ekstern DPN AAIPI Semester II Tahun 2023. Telaah sejawat ekstern ini, dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern terhadap standar, untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP.

Berdasarkan hasil telaah sejawat eksternal (TSE) BPS yang baru diterima pada triwulan II 2024, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap standar adalah 80,35%, dengan kategori penilaian "Baik". Adapun rincian nilai Standar Atributnya adalah 89,51% dan nilai Standar Pelaksanaan adalah 71,19%. Inspektorat Utama diharapkan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pengawasan intern, khususnya pada standar pelaksanaan, penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan *stakeholders*.



**Gambar 6. Dokumentasi Pelaksanaan Telaah Sejawat Eksternal Tahun 2023
Ittama Sekretariat Jenderal DPR RI ditelaah oleh Inspektorat Jenderal BPS RI**

Prestasi selanjutnya diraih oleh Tata Usaha Inspektorat II yang berhasil mendapatkan penghargaan *Silver Winner* sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan kualifikasi informatif tahun 2024, dengan kategori Non AKD. Prestasi tersebut mencerminkan komitmen Inspektorat II terhadap keterbukaan informasi publik yang berkualitas.



**Gambar 7. Dokumentasi Penganugerahan Silver Winner PPID Award 2024
Tata Usaha Inspektorat II, Agustus 2024**

Pada penghujung tahun 2024, Inspektorat Utama berhasil mendapatkan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi internasional yang memiliki implikasi positif terhadap Sekretariat Jenderal DPR RI, diantaranya: peningkatan kredibilitas dan reputasi organisasi, perlindungan hukum dan mitigasi risiko, meningkatkan tata kelola organisasi, dan yang terpenting menunjukkan komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menghindari penyuapan.



**Gambar 8. Dokumentasi Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016
kepada Inspektorat Utama Sekretariat jenderal DPR RI di Jakarta, 20-21 November 2024**

Tidak hanya berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan sertifikasi, Inspektorat Utama Setjen DPR RI juga terus melakukan upaya maksimal dalam rangka memenuhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2024. Pembahasan lebih rinci terkait capaian target indikator kinerja pada masing-masing sasaran program Inspektorat Utama akan dijelaskan pada halaman berikutnya.

SASARAN 1
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI
Yang Berkualitas

Tabel 9. Hasil Capaian Kinerja Setjen DPR RI

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	A 88,00	78,80*	89,55%
	2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB 80,00	68,92	86,15%
	3.	Jumlah Unit Kerja Yang Memenuhi Persyaratan Predikat WBK	6	6	100%
	4.	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
	5.	Tingkat kepatuhan LHKAN	100%	100%	100%
	6.	Nilai IKPA Inspektur Utama:	96	83,61	87,09%
	- Revisi DIPA	9,60	10,00	104,17%	
	- Revisi Hal III DIPA	19,20	8,29	43,17%	
	- Penyerapan Anggaran	24,00	18,32	76,33%	
	- Penyelesaian Tagihan	14,40	10,00	69,44%	
	- Capaian Output	28,80	18,65	64,75%	

*Realisasi 2023

Indeks Reformasi Birokrasi

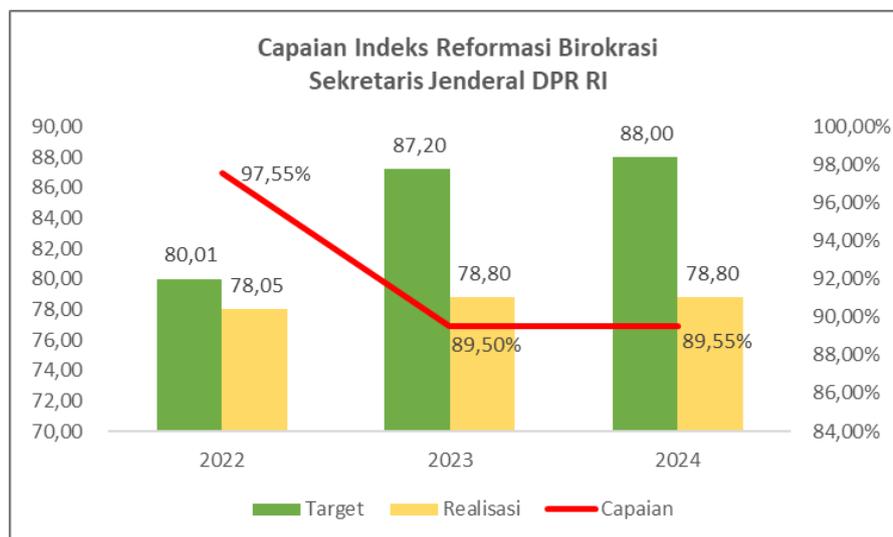
Tabel 10. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

3.1.1. Indeks Reformasi Birokrasi		
Realisasi Kinerja		BB*
Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi		78,80
Target 2024	A 88,00	Tidak tercapai 89,55%
Target Akhir Renstra 2020-2024	A 88,00	Tidak Memenuhi 89,55%
Rata – Rata K/L/Standar Nasional	BB* 76,81	Lebih tinggi 1,99
Realisasi 2022	78,05	Naik 0,75
Realisasi 2023	78,80	tetap

*Realisasi 2023

Sampai dengan laporan kinerja ini disusun, Kementerian PANRB belum menerbitkan hasil evaluasi atas Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Sehingga realisasi tahun 2024 menggunakan data indeks nilai RB tahun 2023, berdasarkan penilaian KemenPAN RB, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 di Setjen DPR RI adalah skor 78,80 dengan kategori BB. Maka, capaian Nilai Indeks RB tahun 2024 dengan menggunakan nilai realisasi tahun 2023 adalah sebesar **78,80%**. Tidak tercapainya target indeks RB terjadi karena indikator-indikator yang bobot nilainya besar (seperti Indikator Capaian IKU dan hasil Survei Penilaian Integritas) memperoleh capaian di bawah target, sehingga indeks RB tidak mendapat nilai maksimal. Selain itu, terdapat perubahan regulasi dalam implementasi reformasi birokrasi, sehingga instansi masih melakukan adaptasi terhadap perubahan regulasi dimaksud.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023, maka terjadi peningkatan yang tidak begitu signifikan. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra, maka capaian indeks RB tahun 2024 (realisasi 2023) sebesar 89,55%, tetapi apabila dibandingkan dengan standar nasional sebesar 76,81 maka nilai indeks RB Setjen DPR RI lebih tinggi 1,9 poin dibandingkan nilai rata-rata Nasional.



Gambar 9. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2022-2024

Faktor kegagalan dalam mencapai nilai indeks RB yang terkait dengan Inspektorat Utama adalah tidak tercapainya pembangunan nilai Zona Integritas dan belum maksimalnya nilai SPI KPK, Upaya kedepan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Utama untuk mencapai indeks Nilai RB adalah dengan melaksanakan

dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kemenpan RB terutama untuk indikator kegiatan utama RB dibawah tanggung jawab Inspektorat Utama terutama untuk indikator kegiatan utama “Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas” dan Survei Penilaian Integritas dimana 2 (dua) indikator ini belum mencapai target *Roadmap* di Tahun 2024 yaitu untuk Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas yang hanya mencapai 5 (lima) unit kerja dengan target sebanyak 6 (enam) unit kerja, sedangkan untuk capaian Nilai SPI pada Tahun 2024 sebesar 77,15. Selanjutnya, Inspektorat Utama akan melakukan evaluasi pelaksanaan ZI dengan mengundang KemenPan RB dan seluruh unit kerja terkait untuk meningkatkan kualitas pembangunan ZI agar penerapan ZI di unit kerja bukan hanya bersifat normatif saja, sehingga pada saat dilakukan penilaian oleh KemenPAN RB, unit kerja di Sekjen DPR RI dapat berhasil menjadi unit kerja yang berpredikat WBK.

Selanjutnya, dalam menetapkan target indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi”, akan menyelaraskan dengan capaian target sebelumnya dan dilakukan evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja secara berkala, sehingga lebih *achievable* dan realistis.

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” dibutuhkan sumber daya yang memadai salah satu yang dapat diukur ialah melalui pemanfaatan anggaran, baik yang bersumber dari anggaran Inspektur Utama maupun anggaran Inspektorat I dan II. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

Tabel 11. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Indeks RB

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	88	78,80*	89,55%	Rp203.843.000	Rp203.843.000	100%	112%

*Realisasi tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sebesar Rp203.843.000 telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 89,55%. Dari perhitungan rumus tersebut, diperoleh nilai efisiensi sebesar 112% yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang optimal belum menghasilkan capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan. Kedepannya, Inspektorat Utama akan menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin dalam pencapaian target indikator kinerja.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Inspektorat Utama melaksanakan *entry meeting* terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan jajaran Biro Perencanaan dan Organisasi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi progress capaian rencana aksi Reformasi Birokrasi Triwulan I, II, dan III untuk Indikator SPIP, SPI KPK dan ZI Tahun 2024.
3. Melakukan evaluasi internal perencanaan Reformasi Birokrasi (*ex ante*) pada Proses Pembangunan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.
4. Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Deputi Bidang Administrasi, Deputi Persidangan dan Badan Keahlian Setjen DPR RI.
5. Melaksanakan Sosialisasi Hasil Penilaian Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 dalam rangka kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 12. Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI

3.1.2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
Realisasi Kinerja		B
Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		68,92
Target 2024	BB 80,00	Tidak tercapai 86,15%
Target Akhir Renstra 2020-2024	BB 80,00	Belum terpenuhi 86,15%
Rata – Rata K/L/ Standar Nasional	B 67,93*	Lebih tinggi 0,99
Realisasi 2022	B 67,28	Meningkat 1,64
Realisasi 2023	B 67,46	Meningkat 1,46

*Realisasi 2023

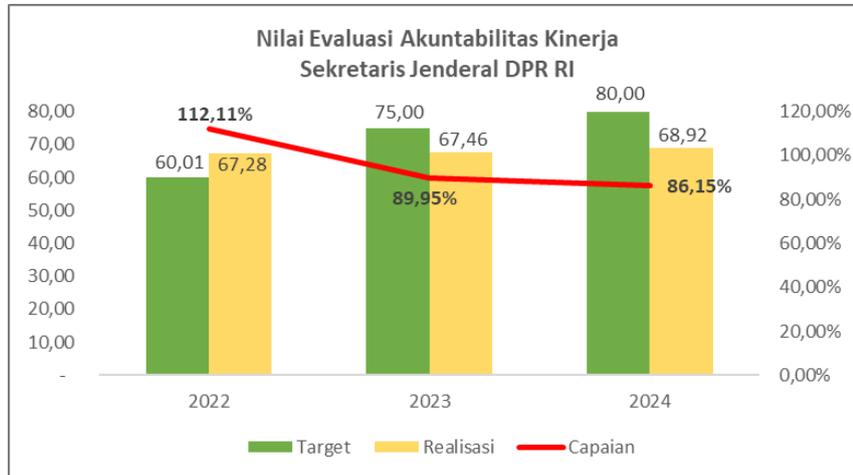
Berdasarkan surat Menteri PANRB No. B/667/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI tahun 2024 mendapatkan skor 68,92 dengan kategori B, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Komponen Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	21,29	21,31
b. Pengukuran Kinerja	30	19,21	19,43
c. Pelaporan Kinerja	15	10,07	10,66
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,89	17,52
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,46	68,92
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Nilai di atas menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik” yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada level instansi dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, namun masih dalam kategori yang sama. Jika disandingkan dengan target akhir renstra, nilai capaian belum memenuhi target sebesar 86,15% dari target akhir yang ditetapkan. Namun apabila dibandingkan dengan rata – rata standar nasional tahun 2023 sebesar

67,93 maka nilai Setjen DPR RI lebih tinggi 1,46 poin diatas rata-rata standar nasional. Sampai dengan laporan ini ditulis, KemenPAN RB belum merilis nilai rata-rata hasil evaluasi SAKIP Kementerian/Lembaga tahun 2024.



Gambar 10. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022-2024

Terdapat perbedaan target “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” pada Renstra Sekjen DPR RI (revisi 2) dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama termasuk pada Renstra Ittama, dimana pada Renstra Sekjen DPR RI (revisi 2), Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar 76,00 kategori BB, sedangkan pada Perjanjian Kinerja dan Renstra Ittama sebesar 80.00 dengan kategory BB. Kedepannya, Renstra Ittama 2025-2029 akan menyesuaikan dengan Renstra Setjen 2025-2029, begitupula Perjanjian Kinerja Ittama akan mengikuti Renstra Ittama dan Setjen Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dalam menetapkan target indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”, akan menyelaraskan dengan capaian target sebelumnya dan dilakukan evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja secara berkala, sehingga lebih *achievable* dan realistis.

Tidak tercapainya target indikator nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI pada tahun 2024 dipengaruhi beberapa hal secara instansi keseluruhan. Namun, yang terkait Inspektorat Utama ialah pada Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023 belum menyampaikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja. Dalam laporan kinerja tahun 2023, sebenarnya telah disampaikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing indikator kinerja, tetapi tidak dijelaskan secara rinci dengan tabel perhitungannya. Oleh karena itu, dalam laporan kinerja tahun 2024 ini, Inspektorat Utama sudah melakukan

perbaikan dengan melakukan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang lebih rinci dan melampirkan tabel perhitungannya.

Dalam upaya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI, telah dilakukan efisiensi dalam hal tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan data untuk mengukur kinerja baik unit kerja maupun individu, sehingga lebih efektif, efisien dan *paperless*.

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” dibutuhkan sumber daya yang memadai salah satu yang dapat diukur ialah melalui pemanfaatan anggaran, baik yang bersumber dari anggaran Inspektur Utama maupun anggaran Inspektorat I dan II. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

Tabel 14. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80 BB	68,92 B	86,15%	Rp75.400.000	Rp75.400.000	100%	116%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar Rp75.400.000 telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 86,15%. Dari perhitungan rumus tersebut, diperoleh nilai efisiensi sebesar 116% yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan mencapai target kinerja belum optimal. Kedepannya, Inspektorat Utama akan menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin dalam pencapaian target indikator kinerja.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan tahun 2024 dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja atas nilai evaluasi akuntabilitas kinerja antara lain:

1. Menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Setjen DPR RI melalui Keputusan Setjen DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 yang telah disesuaikan dengan PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Internal baik tingkat Setjen, eselon II maupun eselon III, yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi sakip internal.
4. Pelatihan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.



Gambar 11. Dokumentasi Penghargaan Atas Implementasi SAKIP Terbaik Tahun 2024

Jumlah Unit Kerja Yang Memenuhi Persyaratan Predikat WBK

Tabel 15. Realisasi Jumlah Unit Kerja yang Memenuhi Persyaratan Predikat WBK

3.1.3. Jumlah Unit Kerja Yang Memenuhi Persyaratan WBK		
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Unit Kerja Yang Memenuhi Persyaratan Predikat WBK		6 Unit Kerja
Target 2024	6 unit kerja	Tercapai 100%
Target Akhir Renstra 2020-2024	6 unit kerja	Terpenuhi/Tercapai 100%
Rata – Rata K/L/ Standar Nasional	-	-
Realisasi 2022	4 unit kerja	Meningkat 2 unit kerja
Realisasi 2023	5 unit kerja	Meningkat 1 unit Kerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024 oleh Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas Sekretariat Jenderal DPR RI, jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK dan diajukan ke Tim Penilai Nasional KemenPAN RB sebanyak 6 (enam) unit kerja yang terdiri dari Biro Persidangan I, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Pusat Teknologi Informasi, Biro Keuangan dan Biro Pemberitaan dan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI. Sehingga untuk capaian kinerja tahun 2024 indikator tersebut telah tercapai 100% begitu pula dengan target akhir renstra telah terpenuhi. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 dan 2023 maka capaian di tahun 2024 terus meningkat dari 4 (empat) unit kerja menjadi 6 (enam) unit kerja, berikut hasil penilaian TPI Setjen DPR RI:

Tabel 16. Rekapitulasi Penilaian TPI Setjen DPR RI

REKAPITULASI HASIL NILAI TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS MENUJU PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN 2024											
No	Unit/Satuan Kerja	PERSYARATAN ADMINISTRASI									Nilai TPI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	WBK	Pembangunan 1 Tahun	SPTJM	Ikhtisar Pembangunan	LKE	ZERO TLHP APIP & BPK	100% LHKPN & LHKAN	Matriks Risiko	Laporan Survei	LHE AKIP Internal Min "B"	
1	Biro Kesekretariatan Pimpinan	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	88,28
2	Biro Pemberitaan Parlemen	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	85,99
3	Biro Persidangan I	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	88,38
4	Biro Sumber Daya Manusia	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	92,36
5	Pusat Teknologi Informasi	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	94,44
6	Biro Keuangan	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	94,52

Untuk indikator Zona Integritas belum terdapat rata – rata standar nasionalnya, namun berdasarkan data pada KemenPAN RB, secara kumulatif unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.600 unit. Selain itu, terdapat perbedaan redaksional antara Renstra Sekjen DPR RI dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang awalnya adalah jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK menjadi jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK. Perubahan ini dikarenakan berdasarkan pertimbangan pimpinan ititama bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja dan nilainya tidak dapat diprediksi/terkontrol dikarenakan penilaian dilakukan oleh KemenPAN RB, sehingga Inspektorat Utama hanya bertugas sebagai tim penilai internal yang tanggung jawabnya hanya sampai memastikan unit kerja tersebut memenuhi persyaratan predikat WBK.



Gambar 12. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK tahun 2024

Faktor Keberhasilan dari tercapainya indikator ini, dikarenakan komitmen dari inspektorat utama sebagai Tim Penilai Internal untuk mewujudkan semua unit kerja di Sekjen DPR RI memenuhi persyaratan predikat WBK. Inspektorat Utama kedepannya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK melalui pendampingan dan pemantauan pemenuhan dokumen hasil tindak lanjut rekomendasi dari KemenPAN RB ke masing-masing unit kerja pengusul yang berkolaborasi dengan Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB).

Dalam upaya mencapai jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK, dibutuhkan sumber daya salah satunya adalah anggaran baik yang bersumber dari anggaran Inspektur Utama maupun anggaran Inspektorat I dan II. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

Tabel 17. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Unit Kerja Yang Memenuhi Persyaratan Predikat WBK

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Terwujudnya tata Kelola pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK	6 unit kerja	6 unit kerja	100%	Rp156.574.000	Rp155.639.000	99,4%	99%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Unit Kerja Yang Memenuhi Persyaratan Predikat WBK sebesar Rp156.574.000 telah direalisasikan sebesar 99,4% dengan capaian kinerja 100%. Dari perhitungan rumus tersebut, diperoleh nilai efisiensi sebesar 99% yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan mencapai target kinerja telah efisien.

Adapun, kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Jumlah Unit Kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK” antara lain:

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pengusulan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2024;
2. Rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi dan pengusulan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024;
3. Melaksanakan Reviu dan Pendampingan Pengisian LKE atas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Hotel Novotel Jakarta;
5. Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI hadir secara *virtual entry meeting* Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2023.



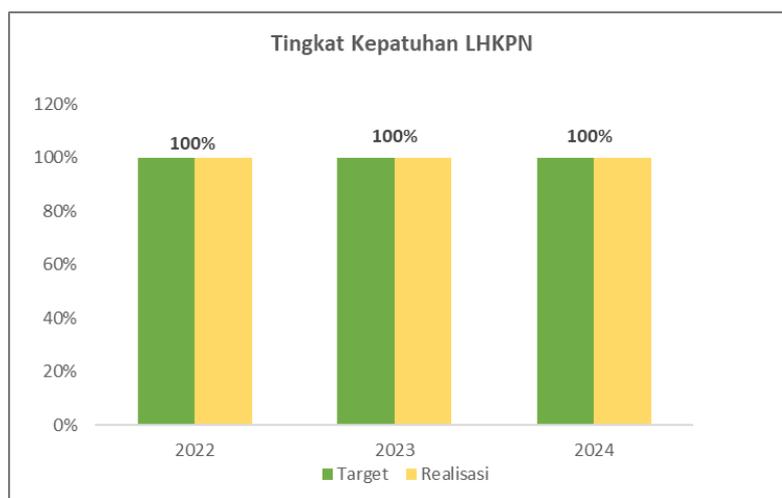
Gambar 13. Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim TPI Pembangunan ZI dan Submit Evaluasi Penilaian ZI ke TPN

Tingkat Kepatuhan LHKPN

Tabel 18. Realisasi Capaian Tingkat Kepatuhan LHKPN

3.1.4. Tingkat Kepatuhan LHKPN		
Realisasi Kinerja		100%
Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKPN		100%
Target 2024	100%	Tercapai 100%
Target Akhir Renstra 2020 - 2024	100%	Tercapai 100%
Rata – Rata K/L/ Standar Nasional	100%	Tercapai 100%
Realisasi 2022	100%	Mempertahankan
Realisasi 2023	100%	Mempertahankan

Tingkat kepatuhan LHKPN pada tahun 2024, telah terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Utama 2024 dan Renstra Utama revisi. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dan 2023, capaiannya selalu sesuai target yaitu 100% dan apabila dibandingkan dengan capaian akhir Renstra Utama Tahun 2024, maka nilai kepatuhan LHKPN telah tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Renstra Utama. Namun tingkat Kepatuhan LHKPN tidak memiliki rataan nilai nasional, sehingga capaian kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nilai nasional pada Kementerian/Lembaga. Adapun capaian dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 14. Grafik Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKPN Setjen DPR RI



Gambar 15. Monitoring Pelaporan LHKPN di aplikasi E-LHKPN

Berikut adalah jumlah Wajib Laport LHKPN Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Pelaporan 2024:

No.	Unit Kerja	Wajib Laport	PN/WL Online	PN/WL Offline	Sudah Laport	Belum Laport	Tepat Waktu	Terlambat	Pelaporan
1	BADAN KEAHLIAN	11	11	0	11	0	11	0	100,00%
2	DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	25	25	0	25	0	25	0	100,00%
3	DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	16	16	0	16	0	16	0	100,00%
4	INSPEKTORAT UTAMA	41	41	0	41	0	41	0	100,00%
5	PIMPINAN TERTINGGI	1	1	0	1	0	1	0	100,00%
6	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	2	0	2	0	2	0	100,00%
7	PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI	2	2	0	2	0	2	0	100,00%

Gambar 16. Jumlah Wajib Laport LHKPN Setjen DPR RI Tahun 2024

Faktor keberhasilan dan tercapainya target tingkat kepatuhan LHKPN yang ditetapkan dari tahun ke tahun merupakan hasil dari konsistensi Inspektorat Utama dalam melakukan pemantauan dan pendampingan dalam pengisian LHKPN. Selain itu, setiap tahun juga diselenggarakan sosialisasi pengisian LHKPN dengan narasumber langsung dari KPK, hal ini untuk memastikan semua pegawai dapat mengisi LHKPN dengan benar dan tepat.

Dalam rangka mencapai indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan LHKPN” dibutuhkan sumber daya yang salah satunya adalah anggaran yang bersumber dari anggaran Inspektur Utama. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

Tabel 19. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Tingkat Kepatuhan LHKPN

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%	Rp83.056.000	Rp83.056.000	100%	100%

Berdasarkan tabel dan rumus diatas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tingkat Kepatuhan LHKPN sebesar Rp83.056.000 telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Dimana nilai efisiensinya sebesar 100% yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan mencapai target kinerja telah efisien (*break even point*).

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, antara lain:

- Bimbingan Teknis dan Sosialisasi pengisian LHKPN.
- Pemantauan dan pendampingan LHKPN, Pendampingan berupa layanan informasi/konsultasi dan *helpdesk* pengisian LHKPN.
- Koordinasi yang dilakukan secara efektif dengan KPK dan seluruh unit di Setjen DPR RI.



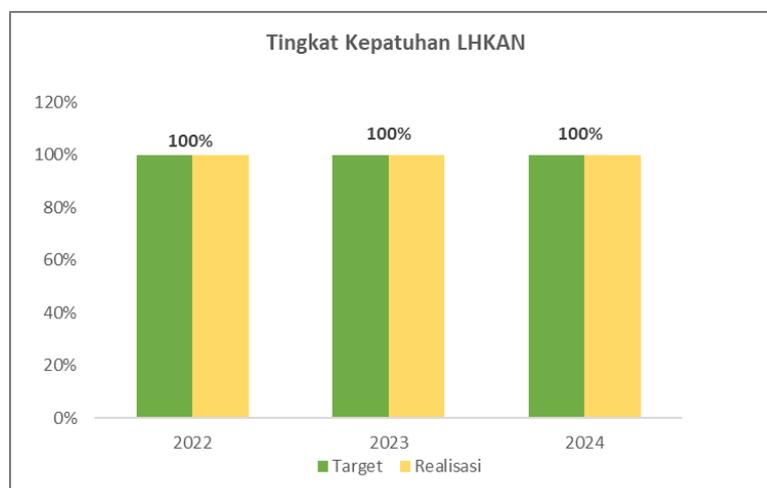
Gambar 17. Dokumentasi Bimtek dan Sosialisasi Pengisian LHKPN dan *Helpdesk* pengisian LHKPN

Tingkat Kepatuhan LHKAN

Tabel 20. Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKAN

3.1.5. Tingkat Kepatuhan LHKAN		
Realisasi Kinerja		100%
Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKAN		
Target 2024	100%	Tercapai 100%
Target Akhir Renstra 2020-2024	100%	Tercapai 100%
Rata – Rata K/L/ Standar Nasional	100%*	Tercapai 100%
Realisasi 2022	100%	Mempertahankan
Realisasi 2023	100%	Mempertahankan

Untuk tingkat kepatuhan LHKAN pada tahun 2024, nilai capaian telah terealisasi sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Ittama tahun 2024 dan Renstra Ittama revisi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 2023, konsisten telah terealisasi dengan capaian 100% begitupula, apabila dibandingkan dengan capaian akhir Renstra maka Tingkat Kepatuhan LHKAN tahun 2024 telah tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun, capaian ini, tidak dapat dibandingkan dengan tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata Kementerian/Lembaga di Indonesia atau Standar Nasional, dikarenakan data dimaksud tidak tersedia. Berikut adalah capaian yang diraih oleh Ittama dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024:



Gambar 18. Grafik Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan LHKAN Setjen DPR RI

Adapun, faktor keberhasilan dan tercapainya target tingkat kepatuhan LHKAN yang ditetapkan dari tahun ke tahun merupakan hasil dari konsistensi Inspektorat Utama dalam melakukan pemantauan dan pendampingan LHKAN setingkat eselon I dan II. Selain itu, setiap tahun Ittama selalu melakukan sosialisasi dan menyampaikan surat edaran ke unit kerja untuk mengingatkan untuk melakukan pengisian e-SPT di jajarannya dengan menyerahkan bukti penyampaian e-SPT ke Ittama serta berkoordinasi dengan Biro Keuangan terkait sosialisasi/*coaching clinic* pengisian e-SPT.

Dalam rangka mencapai indikator kinerja “Tingkat Kepatuhan LHKAN”, Inspektorat Utama menggunakan sumber daya seperti penggunaan teknologi informasi dan berkolaborasi dengan unit kerja maupun instansi terkait. Selain itu, Inspektorat Utama menggunakan anggaran dikarenakan untuk pendampingan pengisian LHKAN sebesar Rp2.790.000 yang telah terealisasi 100%. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

Tabel 21. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Tingkat Kepatuhan LHKAN

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Tingkat Kepatuhan LHKAN	100%	100%	100%	Rp2.790.000,00	Rp2.790.000,00	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tingkat Kepatuhan LHKAN sebesar Rp2.790.000,00 telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Dari perhitungan rumus tersebut, diperoleh nilai efisiensi sebesar 100% yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan mencapai target kinerja Tingkat Kepatuhan LHKAN telah efisien (*break even point*).

Adapun, kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, antara lain melakukan pendampingan di tingkat eselon II, menyampaikan pengumuman untuk melakukan pelaporan LHKAN di portal DPR RI, serta berkoordinasi dengan Biro Keuangan DPR RI.

Nilai IKPA Inspektur Utama

Tabel 22. Realisasi Nilai IKPA Inspektur Utama

3.1.6. Nilai IKPA Inspektur Utama		
Realisasi Kinerja		83,61
Indikator Kinerja Nilai IKPA Inspektur Utama		
Target 2024	96	Tidak Tercapai 87,09%
- Revisi DIPA	9,60	10,00
- Deviasi Halaman III DIPA	19,20	8,29
- Penyerapan Anggaran	24,00	18,23
- Penyelesaian Tagihan	14,40	10,00
- Capaian Output	28,80	18,65
Target Akhir Renstra 2020-2024	96	Tidak Tercapai 87,09%
- Revisi DIPA	9,60	10,00
- Deviasi Halaman III DIPA	19,20	8,29
- Penyerapan Anggaran	24,00	18,23
- Penyelesaian Tagihan	14,40	10,00
- Capaian Output 18,23	28,80	18,65
Rata-Rata K/L/ Standar Nasional	-	

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan *instrument* baru yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2024. Nilai IKPA dapat mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran unit kerja pada tahun berjalan yang mencerminkan kesesuaian perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Adapun komponen yang mempengaruhi nilai IKPA antara lain: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan pagu anggaran, penyelesaian tagihan dan capaian output.

Pada tahun 2024, capaian nilai IKPA Inspektur Utama sebesar 83,61 yang artinya hanya mencapai 87,09% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja maupun target akhir renstra utama Tahun 2024. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2022 dan 2023, karena IKPA baru ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Nilai IKPA tidak dapat dibandingkan dengan rata – rata

Kementerian/Lembaga atau standar nasional, dikarenakan data tidak tersedia, namun apabila dibandingkan dengan capaian akhir renstra Tahun 2024, maka Nilai IKPA hanya mencapai 87,09% dari target yang ditetapkan.

Rendahnya capaian nilai IKPA diakibatkan adanya faktor kegagalan yaitu rendahnya capaian pada komponen deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan capaian outputnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan Sekjen DPR RI pada pelaksanaan anggaran di awal tahun yang berimbas sampai akhir tahun, dimana kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dan harus disesuaikan sehingga terjadi perubahan kegiatan dan jumlah kegiatan menjadi tidak terlaksana dengan baik yang mempengaruhi target penyerapan anggaran tiap triwulan dan berdampak langsung pada deviasi halaman III DIPA yang hanya bisa diubah per triwulan. Kedepannya, strategi yang akan diterapkan dalam mencapai nilai IKPA adalah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana penyerapan anggaran dan penarikan dana yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi deviasi, serta Inspektorat Utama akan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait yaitu Biro Perencanaan dan Organisasi dan Biro Keuangan. Selain itu, dalam menetapkan target indikator kinerja “Nilai IKPA Inspektorat Utama”, akan menyelaraskan dengan capaian target sebelumnya dan dilakukan evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja keuangan secara berkala, sehingga lebih *achievable* dan realistis.

Dalam rangka mencapai indikator kinerja “Nilai IKPA Inspektur Utama”, dibutuhkan sumber daya yang salah satunya adalah anggaran yang bersumber dari anggaran Inspektur Utama. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

Tabel 23. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Nilai IKPA

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Nilai IKPA Inspektur Utama	96	83,61	87,09%	Rp34.883.000,00	Rp34.883.000,00	100%	115%

Berdasarkan tabel dan rumus diatas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Nilai IKPA sebesar Rp34.883.000,00 telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 87,09%. Dimana tingkat efisiensinya adalah 115% yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan mencapai target kinerja Nilai IKPA belum optimal. Kedepannya Inspektorat Utama akan menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka memenuhi target indikator kinerja yang ditetapkan.

Adapun kegiatan yang dilakukan Inspektorat utama untuk mencapai target nilai IKPA di Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, penugasan pada tanggal 18 Juli s.d 2 Agustus 2024.
2. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat I Tahun 2024 pada tanggal 13 Juni s.d. 12 Juli 2024.
3. Melaksanakan Kegiatan Melaksanakan Penyusunan Usulan atas PKPT TA 2025 pada tanggal 18 Juli s.d. 9 Agustus 2024.
4. Melaksanakan rapat koordinasi antara Inspektorat Utama dan Inspektorat II.

SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI

Tabel 24. Realisasi Capaian Skor Maturitas SPIP Setjen DPR RI

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Skor Maturitas SPIP	Level 3 3,28	Level 3 3,60	109,76%

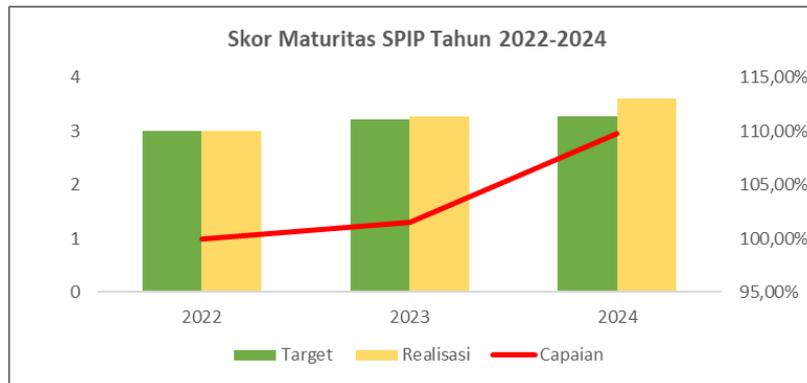
Skor Maturitas SPIP

Tabel 25. Realisasi Skor Maturitas SPIP Setjen DPR RI Tahun 2022-2024

3.2. Skor Maturitas SPIP		
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Skor Maturitas SPIP	Level 3	3,60
Target 2024	Level 3 3,28	Tercapai 109,76%
Target Akhir Renstra 2020-2024	Level 3 3,28	Tercapai 109,76%
Rata-Rata K/L/Standar Nasional	Level 3	100%
Realisasi 2022	Level 3	Mempertahankan dengan skor meningkat
Realisasi 2023	Level 3 (3,27)	Mempertahankan dengan skor meningkat

Berdasarkan surat BPKP Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. PE.09.02/LHP-154/D202/02/2024 tanggal 9 Desember 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekjen DPR RI Tahun 2024, disampaikan bahwa skor maturitas SPIP Tahun 2024 ialah 3,60 dengan kategori pada level 3. Nilai tersebut naik jika dibandingkan dengan skor tahun 2023 sebesar 3,27. Maka pada tahun 2024, skor maturitas SPIP telah melebihi target sebesar 109,76% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, begitupula apabila dibandingkan dengan capaian akhir pada Renstra Ittama, maka skor maturitas SPIP tahun 2024 telah melampaui target akhir sebesar 109,76% yaitu pada level 3,60.

Untuk level 3 pada SPIP dapat diartikan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendaliannya telah dilaksanakan namun belum efektif. Adapun capaian skor maturitas SPIP Setjen DPR RI dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:



Gambar 19. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Skor Maturitas SPIP Tahun 2022-2024

Apabila dibandingkan dengan skor maturitas SPIP Lembaga Negara setara seperti Inspektorat BPK RI, berdasarkan berita pada website BPK RI pada tanggal 18 Desember 2024, bahwa Inspektorat BPK RI berhasil mencapai level 4 dalam maturitas SPIP, yang artinya capaian tersebut berada 1 level di atas Inspektorat Utama Setjen DPR RI.

Faktor keberhasilan dari tercapainya target skor maturitas SPIP tahun 2024, adalah wujud kerja nyata Inspektorat Utama dalam menindaklanjuti rekomendasi tim evaluasi dari BPKP yaitu dengan memenuhi *area of improvement* implementasi SPIP. Inspektorat Utama akan terus berkomitmen dalam melakukan perbaikan berdasarkan saran yang diberikan oleh BPKP kepada Setjen DPR RI maupun Ittama Setjen DPR RI.

Dalam rangka mencapai indikator kinerja “Skor Maturitas SPIP”, dibutuhkan sumber daya yang salah satunya adalah anggaran yang bersumber dari anggaran Inspektur Utama dan Inspektorat II. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

Tabel 26. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Skor Maturitas SPIP

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,28)	Level 3 (3,60)	109,76%	Rp500.037.030, 00	Rp500.037.030, 00	100%	91%

Berdasarkan tabel dan rumus diatas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Skor Maturitas SPIP sebesar Rp500.037.030,00 telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 109,76%. Dimana nilai efisiensi sebesar 91% yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan mencapai target kinerja Nilai Skor Maturitas SPIP telah efisien.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian “Skor Maturitas SPIP” menggunakan anggaran di Inspektorat Utama maupun anggaran Inspektorat I dan II seefisien mungkin dengan menggabungkan beberapa kegiatan dalam 1 (satu) kegiatan secara bersamaan dan anggaran tersebut telah terealisasi 100%, adapun kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024, antara lain:

1. *Benchmarking/knowledge sharing* Inspektorat II dalam rangka mencari informasi dan masukan terkait peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Inspektorat Kota Balikpapan, Maret 2024;
2. Bimbingan Teknik Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta;
3. Evaluasi Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2024;
4. Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP;

5. Pendampingan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.



Gambar 20. Dokumentasi *Benchmarking* Maturitas SPIP dan SPI KPK ke Inspektorat Prov Kalimantan Timur

SASARAN 3

Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tabel 27. Hasil Capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK dan APIP Setjen DPR RI

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	90%	95,12%	105,69%
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	68%	88,1%	129,56%

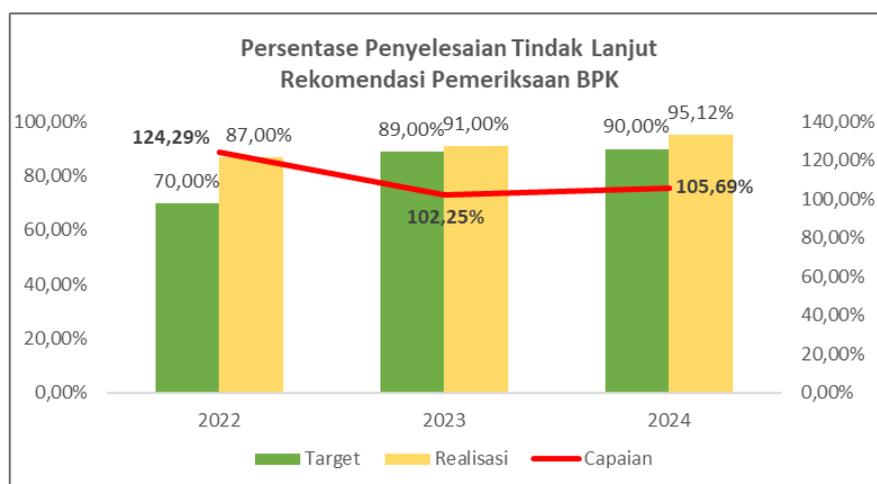
*Realisasi Smt I 2024

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Tabel 28. Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi
Pemeriksaan BPK di Setjen DPR RI

3.3.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK		
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK		95,12%*
Target	90%	Tercapai 105,69%
Target Akhir Renstra 2020-2024	90%	Tercapai 105,69%
Rata – Rata K/L/ Standar Nasional	83,90%	Melebihi Standar Nasional 6,71 poin
Realisasi 2022	86,75%	Meningkat 8,37 poin
Realisasi 2023	91%	Meningkat 4,12 poin

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester I 2024, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK yang berhasil diselesaikan Setjen DPR RI ialah sebesar 95,12%, capaian ini meningkat signifikan naik sebesar 8,37 dan 4,12 poin dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 serta telah melampaui target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maupun Renstra Ittama sebesar 105,69%.



Gambar 21. Grafik Target, Realisasi dan Capaian
Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK Tahun 2022-2024

Capaian tahun 2024 sebesar 95,12% apabila dibandingkan dengan standar nasional yang diumumkan oleh Ketua BPK RI pada kegiatan *entry meeting* dengan pimpinan kementerian/Lembaga di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III pada tanggal 5 Januari 2024 di kantor pusat BPK, dinyatakan bahwa hingga semester I tahun 2024 menunjukkan rata-rata penyelesaian sebesar 83,90% (sumber website BPK RI) yang artinya rata – rata standar nasional berada dibawah dari capaian yang diraih oleh Ittama Setjen DPR RI.

Faktor keberhasilan yang diraih oleh Inspektorat Utama dalam beberapa tahun terakhir pada Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Mendorong unit kerja untuk melakukan penyelesaian temuan BPK dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diterbitkan;
- b. Pemantauan tindak lanjut secara efektif terhadap audit;
- c. Koordinasi dan konsultasi dengan BPK RI dalam proses penyelesaian rekomendasi BPK termasuk pemenuhan eviden tindak lanjut, terutama untuk temuan diatas 10 tahun;

Dalam rangka mencapai indikator kinerja “Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK”, dibutuhkan sumber daya yang salah satunya adalah anggaran yang bersumber dari anggaran Inspektur Utama, Inspektorat I dan II. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

Tabel 29. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	90%	95,12%	105,69%	Rp260.288.000,00	Rp260.288.000,00	100%	95%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI sebesar Rp260.288.000,00 telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 105,69%. Hasil perhitungan menggunakan rumus efisiensi tersebut, diperoleh nilai efisiensi sebesar 95% yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan mencapai target kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI telah efisien .

Adapun, kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI” pada tahun 2024 untuk mendukung keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Melakukan pendampingan kepada auditi sejak pengisian jawaban konsep temuan BPK sampai dengan pemenuhan eviden tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
2. Menyelenggarakan rapat pembahasan *progress report* tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh AP/IP minimal dua kali setahun sesuai PKPT berbasis risiko.



Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan penyelesaian TLHP BPK RI

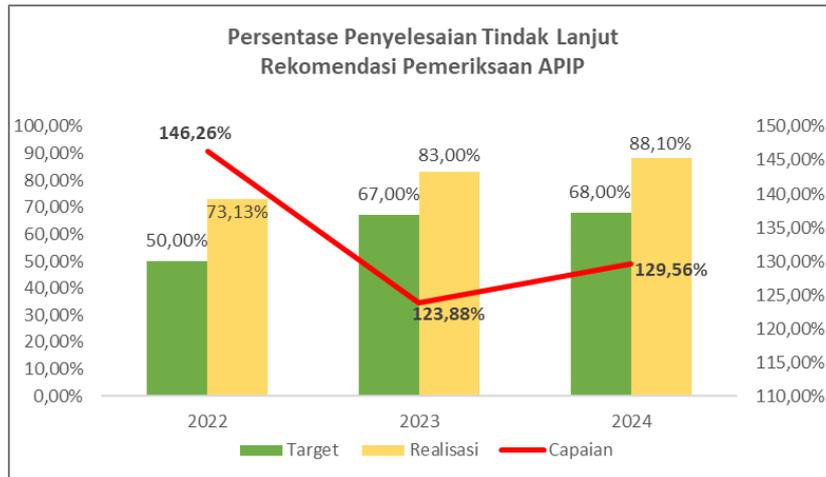
Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP

Tabel 30. Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut
Rekomendasi Pemeriksaan APIP di Setjen DPR RI

3.3.2. Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP		
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP		88,1%
Target 2024	68%	Tercapai 129,56%
Target Akhir Renstra 2020-2024	68%	Tercapai 129,56%
Rata – Rata K/L/Standar Nasional	-	-
Realisasi 2022	73,13%	Meningkat 14,97 poin
Realisasi 2023	82,5%	Meningkat 5,60 poin

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP semester II 2024, bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP Tahun 2024 sebesar 88,1%. Angka ini telah melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2024 dan Renstra Utama sebesar 129,56%. Apabila dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023, terdapat kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Renstra Utama, seharusnya target yang ditetapkan pada tahun berjalan, menyesuaikan capaian tahun sebelumnya dengan tetap mempertimbangkan jumlah temuan yang belum selesai dan potensi temuan di tahun berikutnya. Kedepannya, target pada indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP akan disesuaikan dengan data historis, kapasitas dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi.

Untuk Capaian persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata Kementerian/Lembaga atau standar nasional dikarena data pembanding tidak tersedia. Berikut capaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024:



Gambar 23. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP Tahun 2022-2024

Adapun, Faktor keberhasilan Ittama meraih capaian 129,56% pada tahun 2024 dipengaruhi oleh diselenggarakannya kegiatan pemantauan terhadap hasil pengawasan APIP di lingkup Inspektorat I maupun Inspektorat II secara berkala dan berjalan cukup efektif, serta rendahnya target capaian yang ditetapkan pada tahun 2024. Kedepannya Ittama akan menyesuaikan target pada Perjanjian Kinerja 2025 berdasarkan pertimbangan capaian kinerja tahun 2024 dan juga banyaknya temuan yang belum selesai serta potensi temuan pada tahun 2025.

Keberhasilan capaian indikator kinerja “Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP”, dibutuhkan sumber daya yang salah satunya adalah anggaran yang bersumber dari anggaran Inspektur Utama, Inspektorat I dan II. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

**Tabel 31. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	68%	88,1%	129,56%	Rp2.692.472.000,00	Rp2.690.554.500,00	99,93%	77%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP sebesar Rp2.692.472.000,00 telah direalisasikan sebesar 99,93% dengan capaian kinerja 129,56%. Dimana hasil perhitungan dari rumus tersebut, diperoleh nilai efisiensi sebesar 77% yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan mencapai target kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP telah efisien.

Adapun upaya yang dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP pada Tahun 2024, antara lain:

- a. Melakukan perbaikan pada pelaporan pengawasan dan rekomendasi hasil pengawasan dengan cara peningkatan kompetensi auditor;
- b. Pemantauan tindak lanjut yang dilakukan setiap semester terhadap audit;
- c. Mendorong unit kerja melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Hasil Pengawasan terbit.

SASARAN 4

Meningkatnya Kualitas Dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Utama

Tabel 32. Hasil Capaian Nilai Evaluasi AKIP dan Kapabilitas APIP Inspektorat Utama

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1.	Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama	BB 80	BB 76,20	95,25%
		2.	Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3 3,00	Level 3 3,38	112,67%

Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama

Tabel 33. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Utama

3.4.1. Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama		
Realisasi Kinerja		BB
Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Utama		76,20
Target 2024	BB 80,00	Tidak Tercapai 95,25%
Target Akhir Renstra 2020-2024	BB 80,00	Tidak Tercapai 95,25%
Rata – Rata K/L/Standar Nasional	-	-
Realisasi 2022	B 67,00	Meningkat 9,20 poin
Realisasi 2023	B 72,15	Meningkat 4,05 poin

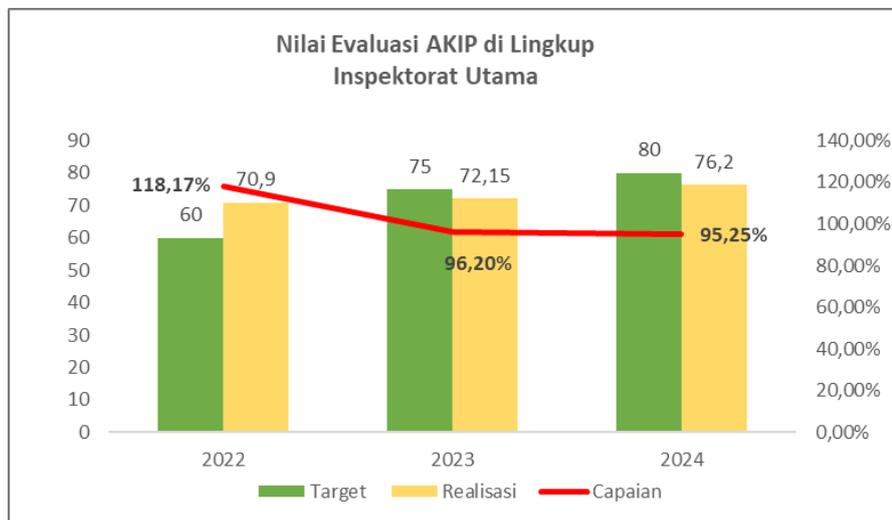
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Internal Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Inspektorat Utama Setjen DPR RI, bahwa nilai evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama adalah sebesar 76,20 dengan predikat BB. Nilai ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2024 dan Renstra Ittama yaitu 80,00 (BB) namun untuk kategorinya sendiri yaitu BB atau sangat baik, telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut adalah rincian hasil evaluasi AKIP di Lingkup Ittama:

Tabel 34. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Utama Tahun 2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	22,80	22,80
b. Pengukuran Kinerja	30	20,70	23,40
c. Pelaporan Kinerja	15	11,40	12,75
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,25	17,25
Nilai Hasil Evaluasi	100	72,15	76,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	100	BB	BB

Berdasarkan tabel di atas, terjadi kenaikan skor jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022, namun nilai tersebut belum memenuhi target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Renstra Ittama dengan capaian kinerja sebesar 95,25%. Nilai evaluasi AKIP di Lingkup Ittama tidak dapat dibandingkan dengan nilai rata-rata Kementerian/Lembaga atau standar nasional dikarenakan data pembanding tidak tersedia. Kedepannya target nilai evaluasi AKIP akan diselaraskan dengan yang lebih *achievable*, berikut capaian nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Utama dari tahun ke tahun dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Gambar 24. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama



Adapun, faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya nilai yang ditetapkan, disebabkan penetapan target nilai evaluasi AKIP yang jauh lebih tinggi pada tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, selain itu adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang target tahun 2024 nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, yakni persentase penyelesaian rekomendasi APIP. Penetapan target tahun 2024 dinilai lebih rendah dan “kurang menantang” dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, yang menyebabkan nilai evaluasi AKIP tidak mendapatkan nilai maksimal dari tim evaluasi internal. Oleh karena itu, kedepannya Inspektorat Utama akan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang disarankan oleh tim evaluasi internal, yaitu berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi terkait penyesuaian target pada indikator nilai evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama dan persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP.

Dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama, Inspektorat Utama menggunakan anggaran Inspektur Utama maupun anggaran Inspektorat II. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

**Tabel 35. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama	BB 80	BB 76,20	95,25%	Rp151.063.000,00	Rp151.063.000,00	100%	105%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama sebesar Rp151.063.000,00 telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 95,25%. Dimana hasil perhitungan dari rumus tersebut, diperoleh nilai efisiensi sebesar 105% yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan mencapai target kinerja Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama belum efisien, karena dengan penggunaan anggaran yang maksimal belum dapat mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Ittama. Kedepannya Inspektorat Utama akan menggunakan anggaran seefektif dan efisien mungkin dalam rangka memenuhi target indikator kinerja yang ditetapkan.

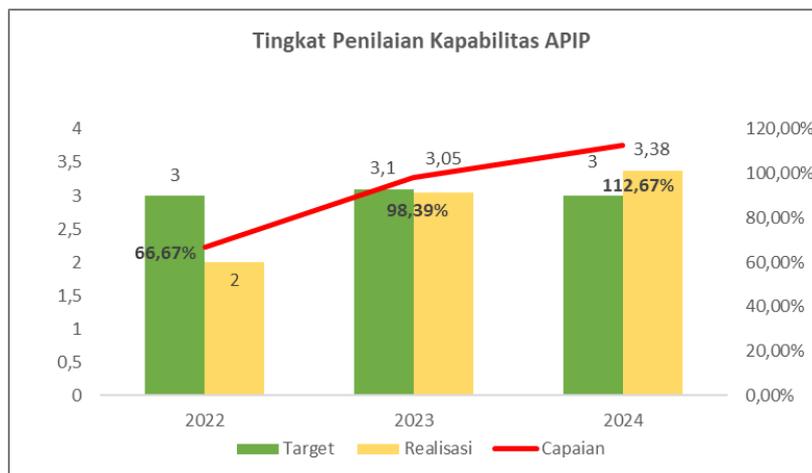
Kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian “Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama” pada Tahun 2024 adalah menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Evaluasi Internal, serta melakukan penelaahan atas kesesuaian dengan Renstra Setjen Tahun 2020 - 2024 (Revisi ke-2).

Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP

Tabel 36. Realisasi Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP

3.4.2. Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP		
Realisasi Kinerja		Level 3
Indikator Kinerja Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP		3,38
Target	Level 3 (3,00)	112,67%
Target Akhir Renstra 2020-2024	Level 3 (3,20)	Tercapai 105,63%
Rata - Rata K/L Standar Nasional	Level 3*	Memenuhi
Realisasi 2022	Level 2+	Meningkat
Realisasi 2023	Level 3 (3,045)	Skor Meningkat 0,335 poin

Berdasarkan Laporan BPKP No. PE.09.03/LHP-220/D202/2/2024 tanggal 5 November 2024 atas Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Setjen DPR RI Tahun 2024, disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Setjen DPR RI berada pada level 3 dengan skor 3,380 yang artinya *integrated* yaitu Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam. Jika dibandingkan dari tahun 2022 sampai dengan 2024, nilai kapabilitas APIP Ittama selalu meningkat seperti yang dapat dilihat dari grafik berikut ini.



Gambar 25. Grafik Target, Realisasi dan Capaian Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP

Skor 3,38 pada level 3 di tahun 2024 ini, telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan capaian sebesar 112,67%. Apabila dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2024 telah terjadi kenaikan yaitu dari level 2+ di tahun 2022 dan level 3 dengan skor 3,045 di

tahun 2023, begitu pula jika membandingkan dengan rata-rata capaian lembaga setara seperti Inspektorat Setjen MPR RI, dimana pada tahun 2024 Inspektorat Setjen MPR RI berada pada level 2. Yaitu lebih rendah 1 (satu) level dibanding Inspektorat Setjen DPR RI. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Sekjen dan Renstra Ittama sebesar 3,2 maka Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 dengan skor 3,38 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 105,63%.

Pada Tahun 2024, terdapat perbedaan antara target akhir Renstra Sekjen RI dengan Perjanjian Kinerja Ittama, kedepannya akan diselaraskan sesuai dengan Renstra Sekjen DPR RI.

Faktor Keberhasilan dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan, Inspektorat Utama terus berkomitmen dalam meningkatkan capaian kapabilitas APIP melalui penguatan praktik-praktik yang baik atas elemen-elemen kapabilitas APIP serta meningkatkan peran Ittama yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan Setjen DPR RI. Selain itu, berperan aktif dalam menindak lanjuti *Area of Improvement* yang telah ditetapkan oleh BPKP pada 6 (enam) elemen yakni pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata dan kelola, serta peran dan layanan.

Dalam rangka upaya meningkatkan “Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP”, Inspektorat Utama menggunakan anggaran Inspektur Utama maupun anggaran Inspektorat II. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, efisiensi sumberdaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

Tabel 37. Efisiensi Alokasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,38)	112,67%	Rp302.750.000,00	Rp302.750.000,00	100%	89%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP sebesar Rp302.750.000,00 telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian kinerja 112,67%. Dimana hasil perhitungan dari rumus tersebut, diperoleh nilai efisiensi sebesar 89% yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan mencapai target kinerja Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP di Lingkup Inspektorat Utama telah efisien.

Adapun, Kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencapaian “Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP” pada tahun 2024, antara lain:

1. Inspektorat Utama melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) dengan Tim Evaluasi BPKP.
2. Membentuk Tim Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Melalui Internal Audit Capability Model (IACM) Tahun Anggaran 2024.
3. *Knowledge sharing* Program dan Kegiatan Pencarian Data dan Informasi terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) di Inspektorat Kabupaten Badung dan Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) di Inspektorat Kota Denpasar, Provinsi Bali.
4. Menyelenggarakan kegiatan paket *meeting* dalam kota dalam rangka peningkatan nilai kapabilitas APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan pemenuhan *area of improvement* pada level 3 IACM dan membahas dan menetapkan prioritas tindakan perbaikan atas hasil nilai IACM tahun 2023 serta persiapan menuju Level 4 IACM dengan mengundang narasumber dari BPKP RI.
5. Melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) Tahun 2024.
6. Melaksanakan rapat dengan BPKP dalam rangka Penyampaian Hasil IACM Tahun 2024.



Gambar 26. Kegiatan upaya pencapaian kapabilitas APIP/IACM

b. Realisasi Anggaran

Inspektorat Utama melaksanakan program dan kegiatan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2024 didukung dengan pagu anggaran setelah optimalisasi sebesar Rp7.850.390.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pagu anggaran Inspektorat I sebesar Rp2.994.424.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan pagu anggaran Inspektorat II sebesar Rp4.855.966.000,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pagu Anggaran Inspektorat II sejumlah Rp4.855.966.000,00 terdiri dari pagu anggaran Inspektur Utama sebesar Rp2.994.424.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan pagu anggaran Inspektorat II sebesar Rp1.909.244.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Berikut adalah realisasi anggaran Inspektorat Utama Tahun 2024:

Tabel 37. Realisasi Pagu Anggaran Inspektorat Utama pada Tahun 2024
(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2024)

Unit	Pagu Setelah Optimalisasi	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
Inspektorat I	Rp2.994.424.000,00	Rp2.992.506.500,00	Rp1.917.500,00	99,94%
Inspektorat II	Rp1.909.244.000,00	Rp1.909.243.210,00	Rp790,00	100%
Inspektur Utama	Rp2.946.722.000,00	Rp2.946.628.472,00	Rp93.528,00	100%
Total	Rp7.850.390.000,00	Rp7.848.378.182,00	Rp2.011.818,00	99,97%

Berdasarkan data tersebut, realisasi anggaran Inspektorat Utama pada tutup buku tahun 2024 mencapai 99,97%, yang terdiri dari realisasi anggaran Inspektorat I sebesar 99,94% dengan 2 (dua) indikator kinerja yang tidak tercapai pada perjanjian kinerja yaitu jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK dan Nilai IKPA Inspektorat I. Untuk realisasi anggaran Inspektorat II sebesar 100% dengan 1 (satu) Indikator kinerja yang tidak tercapai pada perjanjian kinerja yaitu nilai IKPA Inspektorat II. Sedangkan untuk anggaran Inspektur Utama terserap sebesar 99,97% dengan 4 (empat) dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu indeks reformasi birokrasi, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, nilai IKPA Inspektur Utama dan nilai evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama. Namun, target yang tidak tercapai

tersebut, capaiannya tidak terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu masih di atas 85%. Berikut adalah rincian capaian realisasi anggaran secara detail:

Realisasi Anggaran Inspektorat I

Tabel 38. Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektorat I

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Layanan Pengembangan APIP	Rp2.655.865.000,00	Rp2.653.955.500,00	99,93%
2	Layanan Koordinasi Inspektorat I	Rp322.759.000,00	Rp322.755.000,00	100%
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp15.800.000,00	Rp15.796.000,00	99,97%
Total		Rp2.994.424.000,00	Rp2.992.506.500,00	99,94%

Berdasarkan data di atas, realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 mencapai 99,4% yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Pengembangan APIP
 - a. Kegiatan *knowledge sharing* dan peningkatan kapabilitas menggunakan anggaran sebesar Rp1.538.779.000,00.
 - b. Kegiatan audit, reuiu, pengawasan lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp1.115.176.500,00.
2. Layanan Koordinasi Inspektorat I
 - a. Penyusunan program kerja dengan anggaran sebesar Rp293.659.000,00.
 - b. Penyusunan Renja/Laporan Kinerja/PKPT menggunakan anggaran sebesar Rp29.096.000,00.
3. Layanan Audit Internal

Kegiatan probity audit/pemantauan/pendampingan menggunakan anggaran sebesar Rp15.796.000,00.

Realisasi Anggaran Inspektorat II

Tabel 39. Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektorat II

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Layanan Pengembangan APIP	Rp1.896.603.000,00	Rp1.896.602.210,00	100%
2.	Layanan Koordinasi Inspektorat II	Rp10.241.000,00	Rp10.241.000,00	100%
3.	Layanan Audit Internal	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	100%
Total		Rp1.909.244.000,00	Rp1.909.243.210,00	100%

Berdasarkan data di atas, Penggunaan Anggaran Inspektorat II sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Pengembangan APIP
 - a. Kegiatan Pengembangan Kapabilitas menggunakan anggaran sebesar Rp1.044.777.570,00;
 - b. Kegiatan reviu, pengawasan lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp851.824.640,00.
2. Layanan Koordinasi Inspektorat II
 - a. Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 menggunakan anggaran sebesar Rp7.425.000,00;
 - b. Penyusunan Renja/Laporan Kinerja/PKPT menggunakan anggaran sebesar Rp2.816.000,00.
3. Layanan Audit Internal
Kegiatan audit internal dan penyusunan laporan pengawasan menggunakan anggaran sebesar Rp2.400.000,00.

Realisasi Anggaran Inspektur Utama

Tabel 40. Realisasi Penggunaan Anggaran Inspektur Utama

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Layanan koordinasi Inspektorat Utama	Rp2.665.906.000,00	Rp2.665.904.140,00	100%
2.	Layanan Perkantoran	Rp280.816.000,00	Rp280.724.332,00	99,97%
Total		Rp2.946.722.000,00	Rp2.946.628.472,00	100%

Berdasarkan data di atas, penggunaan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan program kerja, renja/laporan kinerja/lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp150.565.050,00;
2. Kegiatan koordinasi penyelesaian TLHP menggunakan anggaran sebesar Rp37.160.000,00;
3. Kegiatan koordinasi peningkatan kapabilitas APIP/IACM dan maturitas SPIP menggunakan anggaran sebesar Rp592.734.850,00;
4. Kegiatan koordinasi pemantauan dan evaluasi PMPRB, PMPZI dan AKIP menggunakan anggaran sebesar Rp420.632.800,00;
5. Kegiatan koordinasi pemantauan LHKPN/LHKAN/Gratifikasi/WBS/SMAP menggunakan anggaran Rp83.055.750,00;
6. Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai di bidang pengawasan (sertifikasi) menggunakan anggaran sebesar Rp1.381.755.690,00;
7. Kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor menggunakan anggaran Rp280.724.332,00.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sebagian besar capaian kinerja Inspektorat utama telah tercapai, dari 11 (sebelas) indikator kinerja, 7 (tujuh) indikator kinerja telah mencapai target dan 4 (empat) indikator kinerja belum memenuhi target. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator yang telah mencapai target capaian kinerja 100% adalah Jumlah Unit Kerja Yang Memenuhi Persyaratan Predikat WBK, Tingkat Kepatuhan LHKPN dan LHKAN;
2. Indikator yang telah melebihi target perjanjian kerja adalah Skor Maturitas SPIP dengan capaian kinerja sebesar 109,76%, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK dengan capaian kinerja sebesar 105,69% dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan APIP dengan capaian kinerja sebesar 129,56%, dan Tingkat Kapabilitas APIP dengan capaian kinerja sebesar 112,67%;
3. Indikator yang belum memenuhi target perjanjian kerja adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja sebesar 89,55% (realisasi 2023), Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan capaian kinerja sebesar 86,15%, Nilai Evaluasi AKIP di Lingkup Inspektorat Utama sebesar 95,25% serta Nilai IKPA Inspektur Utama sebesar 87,09%.

Dengan capaian yang telah diraih pada tahun 2024, secara umum Inspektorat Utama telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, menggunakan anggaran dengan efektif dan efisien, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sampai dengan triwulan IV 2024 Inspektorat Utama telah berhasil menyelesaikan kerugian negara dari hasil pemeriksaan BPK senilai Rp640.140.450,00 (enam ratus empat puluh juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), dan dari hasil pemeriksaan APIP senilai Rp341.765.311,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah).

Kedepannya, untuk meningkatkan capaian indikator kinerja, Inspektorat Utama akan melakukan langkah strategis yang akan dilakukan di tahun 2025 yaitu:

1. Penguatan Tata Kelola Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi.
2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang disesuaikan dengan struktur penganggaran.
3. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama yang berkualitas.
4. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pengawasan Internal yang dapat dipertanggungjawabkan.

LAMPIRAN



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.
Jabatan : Pih. Inspektur Utama

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

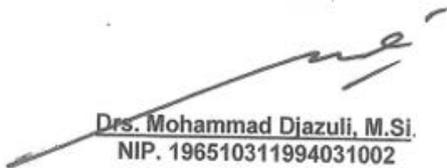
Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023
Pihak Pertama,


Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.
NIP. 196510311994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A (88,00)
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80,00)
		3. Jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan predikat WBK	6
		4. Tingkat kepatuhan LHKPN	100%
		5. Tingkat kepatuhan LHKAN	100%
		6. Nilai IKPA Inspektur Utama - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	96 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,28)
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	90%
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	68%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1. Nilai Evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama	BB (80,00)
		2. Tingkat penilaian kapabilitas APIP	Level 3 (3)

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp10.081.694.000,00

↳Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023
Ph. Inspektur Utama,

Drs. Mohammad Diazuli, M.Si.
NIP. 196510311994031002



Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sumber : PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
		Angka	
1.	AA	> 90 – 100	Istimewa
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	> 30 – 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7.	D	> 0 – 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

**Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
SAKIP SETJEN DPR RI dan SAKIP lingkup Inspektorat Utama**

INSTRUMEN EVALUASI AKIP 2023

DASAR HUKUM Peraturan Menteri PANRB
Nomor 88 Tahun 2021 Tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

"Komponen Capaian Kinerja masuk ke dalam komponen-komponen penilaian yang lainnya"

Komponen	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	30
Pengukuran Kinerja	30
Pelaporan Kinerja	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100

Predikat	Nilai
AA	Nilai > 90 s.d 100
A	Nilai > 80 s.d 90
BB	Nilai > 70 s.d 80
B	Nilai > 60 s.d 70
CC	Nilai > 50 s.d 60
C	Nilai > 30 s.d 50
D	Nilai > 0 s.d. 30

RBKUNWAS

Tabel Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Tingkat Penilaian Kapabilitas APIP

No	Kategori	Interpretasi
1.	Level 1 : <i>Initial</i>	Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu
2.	Level 2 : <i>Infrastructure</i>	Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan
3.	Level 3 : <i>Integrated</i>	Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam
4.	Level 4 : <i>Managed</i>	Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko
5.	Level 5 : <i>Optimizing</i>	Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan

Tabel Pengukuran Skor Maturitas SPIP

0 Belum Ada	K/L/P sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
1 Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2 Berkembang	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3 Terdefinisi	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4 Terkelola & Terstruktur	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, <i>masing-masing personel pelaksana kegiatan</i> yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5 Optimum	K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : ww.dpr.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 025/PI.07/II/2025

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Auditor, dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - b. bahwa penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas.
- Dasar** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021.

Dengan ini memberi tugas :

Kepada :

No.	Nama/NIP	Peran
1.	Dr. Tornagogo Sihombing, S.IK., M.Si., CGRP. NRK. 67110377	Pengarah
2.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. NIP. 19710911 199703 1 005	Penanggung Jawab
3.	Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA. NIP. 19681125 199302 2 001	Penanggung Jawab
4.	Ade Efendi, S.Sos., M.M. NIP. 19711112 199302 1 001	Ketua
5.	Vita Fathiyah Yuniati, S.E., M.Ak. NIP. 19810608 200912 2 001	Wakil Ketua
6.	Alisa Fatimah, S.E. NIP. 19890629 201903 2 002	Sekretaris

-2-

No.	Nama/NIP	Peran
7.	Susriyanto, S.T., M.M NIP. 19760305 199803 1 001	Anggota
8.	Haryanti NIP. 19720417 199203 2 001	Anggota
9.	Zelka Sevrina, S.E. NIP. 19940908 201903 2 002	Anggota
10.	Eri Riefika, S.E., M.Ak. NIP. 19800523 200502 2 001	Anggota
11.	Siti Atiah NIP. 19820711 201212 2 002	Anggota
12.	Gilang Endah Permatasari SIP, M.A., CRMO., QGIA. NIP. 19940521 201609 2 001	Anggota
13.	Sri Hartati Agustin NIP. 19690806 199003 2 001	Anggota
14.	Sri Nastiti Tri Nurasih, S.E. NIP. 19680908 198803 2 001	Anggota
15.	Oki Ganjar Ristawan, S.E. NIP. 19771016 200312 1 002	Tim Layout
16.	Liman Setiawan, S.AP. 198504122009111001	Tim Layout

Untuk : Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2-24.
Pelaksanaan tugas dilaksanakan pada tanggal 6 Januari sampai dengan 17 Januari 2025.
Dalam pelaksanaan penugasan, Pejabat Struktural/Fungsional Auditor Inspektorat Utama dilarang menerima gratifikasi dan wajib menyerahkan laporan maksimal 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya waktu penugasan.
Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 7 Januari 2025

Inspektur Utama,



Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si., CRGPK